



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH Telah divalidasi
RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021 – 2022
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat ke : ...
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri PPN/BAPPENAS
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 3 Februari 2022
Pukul : 10.30 WIB s.d. 13.39 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat dan virtual
Ketua Rapat : Dr.H.M. Amir Uskara, M.Kes/Wakil Ketua Komisi XI DPR
RI
Acara : 1. Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021
2. Rencana Kerja Tahun 2022
Sekretaris : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
PIMPINAN
1 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:
1. H. DITO GANINDUTO, MBA
2. DOLFIE, O.F.P
3. DR. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si
4. DRS. FATHAN
5. Dr. H.M. AMIR USKARA, M.Kes
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**
1. Ir. ANDREAS EDDY SYSETYO, M.M.
2. MARSIAMAN SARAGIH
3. Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.
4. Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO
5. H.M. SAID ABDULLAH
6. I. G. A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.
7. INDAH KURNIA
8. DR. H. MUSTHOFA, S.E., M.M.
9. DR. SIHAR P H. SITORUS, BSBA, MBA
10. MASINTON PASARIBU, S.H.
11. MARINUS GEA, S.E., M.Ak.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

1. H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., MBA.
2. MELCHIAS MARKUS MEKENG
3. H. ANDI ACHMAD DARA, S.E.
4. M. SARMUJI, SE., M.Si
5. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH.
6. Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.
7. PUTERI ANETTA KOMARUDIN

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

1. HERI GUNAWAN, S.E.
2. H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak. M.M.
3. H. KAMRUSSAMAD
4. SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.Sc.
5. ARDHYA PRATIWI S., S.E., M.Sc.
6. WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.
7. HAERUL SALEH, S.H.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1. FAUZI AMRO, M.Si.
2. SATORI, S.Pdi., M.M.
3. H. CHARLES MEIKYANSAH
4. WILLY ADITYA
5. RACHMAT GOBEL

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1. ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.
2. BERTU MERLAS, ST
3. H. ALAMAUDDIN DIMYATI ROIS
4. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1. Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si
2. DIDI IRAWADI SYMADUDDIN, S.H., LL.M.
3. Hj. SITI MUFATTAHAH, P.Si., MBA
4. HARMUSA OKTAVIANI
5. IR. MARWAN CIK ASAN, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1. IR. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.
2. H. HIDAYATULLAH, SE
3. DR. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
4. H. ECKY AWAL MUCHARAM

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1. AHMAD NAJIB QUDRATULLAH, S.E.
2. Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR
3. PRIMUS YUSTISIO, S.E, M.AP.
4. AHMAD YOHAN, M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1. DRA. Hj. WARTIAH, M.Pd.

B. Undangan:

**MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS
(DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):**

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (Dr. H. M. AMIR USKARA, M. Kes./WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.
Shalom.*

Yang terhormat dan tentu kita hormati Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas beserta seluruh jajaran. Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang berbahagia serta Hadirin sekalian yang ada di ruangan maupun yang ada di melalui zoom.

Menurut Laporan dari Sekretariat Komisi XI Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas telah dihadiri secara fisik sebanyak 20 orang dari 8 Fraksi. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI tentang Tatib telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* izinkan kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN Kepala Bappenas dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Sebelum saya lanjut, saya sampaikan kepada teman-teman Anggota Komisi XI baik yang hadir di ruangan maupun yang ada di zoom, Pak Menteri agak kurang sehat hari ini, jadi mungkin agak irit bicara nanti. Kata Pak Menteri kalau DPR yang undang gak boleh gak hadir ini, ngeri.

Hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat Kerja kita hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta 'ala Alhamdulillah, Alhamdulillah* karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri acara Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam keadaan sehat wal 'afiat dan semoga

hal-hal yang akan kita bicarakan pada hari *Insy Allah* akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Agenda Rapat Kerja kita hari ini adalah Pembahasan Evaluasi dan Capaian Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dalam Rapat Kerja hari ini Komisi XI ingin mendapatkan gambaran terkait dengan Pelaksanaan Kinerja Kementerian PPN Bappenas di Tahun 2021 dan Rencana Kerja dan Strategi Tahun 2022 serta *Outlook* di Tahun 2022, Perkembangan Pelaksanaan Penggunaan Vaksin Indonesia dan Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Penggunaan Anggaran APBN 2021/2022, Kebijakan-kebijakan dalam Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 serta Persiapan Sarana dan Prasarana serta Kondisi Perkembangan dan Progres dari Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Baru yaitu Ibu Kota Nusantara.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan paparan penjelasannya. Kalau misalnya Pak Menteri bisa membuka saja kemudian diserahkan ke salah satu deputi untuk memaparkan juga tidak apa-apa. Saya persilakan dengan hormat Pak Menteri.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring.
Para Deputi dan para Staf dari Kantor Bappenas.

Pertama marilah kita naikkan rasa syukur kita ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta 'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk hadir pada hari ini.

Pertama saya mohon maaf, saya sejam baru hadir di sini, karena awalnya saya merasa segar *fit* saja untuk bisa hadir ke sini, karena sejak kemarin sudah mulai pulih *gitu*, ini saya cerita sedikit. Saya kena GERD. Saya baru tahu kalau GERD itu juga berbahaya juga. Mulai dari hari apa itu Minggu, Sabtu-Minggu. Semula saya harus mendampingi Presiden ke Balikpapan dan akhirnya saya membatalkan, saya khawatir karena atas saran dari protokol dan juga Pak Mensesneg untuk tidak lebih baik di jangan dipaksa. Lalu saya takut Omicron gitu saja Pak, saya khawatir Omicron, karena kemudian flu, flu perut datang bersamaan. Jadi GERD dan flu perut ternyata datangnya bersamaan, sehingga mesti dikancing di atas dan di bawah, itu teori dokternya. Saya bilang ini kan repot saya kalau begini. Jadi bisa dapat dibayangkan bagaimana *blutetnya* itu perut.

Nah terus pelan-pelan flu perutnya dulu yang dilepasin, setelah itu akan mengakibatkan gasnya lebih banyak berproduksi lalu pelan-pelan

diturunkan. *Alhamdulillah* diagnosis itu benar gitu ya dibalik kayak gimana. Lumayan jadi ada dua hari saya berbaring nggak ngapa-ngapain gitu. Dites PCR dan negatif, dua kali saya PCR karena khawatir. Saya takut sama Pak Amir kalau *enggak* ke sini.

Kemarin saya sudah lumayan, bahkan tadi malam saya ingin nonton, saya bilang ini saya sudah ingin lihat keluar kan, tapi kok *gak* enak karena kalau GERD tidak membuat demam tapi flu perut membuat demam kan itu demam Pak. Sementara GERD itu mencekak di sini, jadi saya khawatir Omicron karena di ini. Jadi *galau*, kita *galau*.

Tadi pagi saya terlambat minum ini apa ini *disflatyl* ya akibatnya gasnya naik lagi. Ini dari Jam 09.00 saya kena lagi tadi. Mudah-mudahan kita sehat semua karena sekarang Omicron juga lagi serius, tapi mudah-mudahan Omicron hanya kalau bagi yang sudah pernah di setidaknya-tidaknya divaksin lengkap apalagi kalau sudah di *booster* itu bisa maksimum 3 sampai 5 hari ya, tapi *recovery*-nya yang paling penting.

Baik, saya akan mulai dengan evaluasi tahun kegiatan 2021. Saya kira nanti saya akan minta tolong kalau diizinkan Pak Taufik ya menyampaikan tentang capaian-capaian kinerja khusus untuk Bappenas pada Tahun 2021 dan kemudian rencana kerja untuk Tahun 2022 saya minta Ibu Wini ya, tapi saya juga lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang mencakup lebih umum yang nanti saya akan jawab sekaligus juga, tapi kalau diizinkan Ketua untuk menghemat suara saya nggak banyak keluar, saya mohon Pak Taufik bisa mewakili saya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Taufik.

Kalau Pak Menteri mau balik, nggak apa-apa saya kira nanti dilanjutkan sama Deputi.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Oh *enggak*. Saya di sini.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Kalau *enggak*, *enggak* sah.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Taufik.

**DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN RI/BAPPENAS (Dr. Ir. TAUFIK
HANAFI, MUP):**

Baik, terima kasih.

**MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO
MONOARFA):**

DPR itu saya takut, kalau dengan Presiden saya bisa minta izin. Kalau dengan DPR itu izinnnya ke mana gitu nggak ada. Terima kasih.

**DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN RI/BAPPENAS (Dr. Ir. TAUFIK
HANAFI, MUP):**

Baik, terima kasih Bapak Menteri.

Yang kami hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati kami muliakan.

Yang kami hormati Bapak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian PPN Bappenas.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Selamat pagi.

Om swastiastu.

Salam kebajikan.

Izinkan kami menyampaikan meskipun ini yang kami yang menyampaikan kami sebenarnya ini suara Pak Menteri ini sebenarnya, cuma melewati saya saja ya.

Pertama, sesuai dengan agenda undangan dari Komisi XI, kami akan menyampaikan poin-poin penting dan paparan ini juga disusun ya mengikuti pertanyaan-pertanyaan Komisi XI ya yang dikirimkan ke Kementerian PPN/Bappenas dan *outline*-nya ini juga kita sesuaikan untuk sekaligus selain apa menyampaikan evaluasi capaian dan rencana, ini sekaligus juga disusun terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan beberapa waktu yang lalu.

Pertama *Alhamdulillah* realisasi anggaran Kementerian PPN Bappenas 2021 ini termasuk salah satu yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 96,88% 1,141 Triliun. Adapun pagunya adalah 1,178 Triliun. Jadi ini merupakan salah satu apa capaian yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Seperti yang kita lihat pada bagian yang paling kanan itu adalah realisasi antara pagu dan realisasi untuk belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal. Jadi secara garis besar capaian-capaian yang paling

tinggi itu adalah untuk belanja modal persentasenya yaitu 99,76%. Ada beberapa catatan bahwa di sini ada realisasi hibah yang masih dalam proses pengesahan di Kementerian Keuangan yaitu sebesar 15,9 Miliar ya.

Baik terus ke *slide* berikutnya. Paparan ini juga terkait dengan pertanyaan Komisi XI yaitu pertanyaan Nomor 2 mengenai Laporan keuangan. Jadi secara garis besar di sini bisa kita lihat bersama ada Laporan neraca, Laporan operasional, dan Laporan perubahan ekuitas ya. Jadi secara garis besar ini bisa kita lihat bersama jumlah kewajiban dan Kas ekuitas ada minus koma satu koma dua tujuh persen. Demikian juga dengan surplus defisit Laporan operasional jadi minus 7,76%. Sedangkan Laporan perubahan ekuitas di sana tercatat bahwa ekuitas akhir minus 1,9%.

Ya terus saja. Sedangkan kinerja program perencanaan pembangunan nasional, ini bisa kita *summary*-kan ke dalam tiga kelompok besar yaitu Pertama, yang terkait dengan perencanaan dan pengalokasian. Yang Kedua, terkait dengan pengendalian pelaksanaan prioritas nasional, dan yang Ketiga, adalah peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *enabler*.

Seperti yang kita lihat bersama bahwa terkait dengan perencanaan dan pengalokasian telah dilakukan kegiatan-kegiatan penting dalam proses penyusunan RKP seperti Rakor Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan seluruh gubernur. Ini juga pertemuan dengan para Menteri terkait yaitu terkait dengan *major project*. Demikian juga kegiatan *trilateral meeting* ini juga melibatkan tidak hanya kementerian lembaga perwakilan, tapi juga dengan para menteri terkait yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri. Demikian juga dengan Rapat Koordinasi Menteri PPN dengan Menteri BUMN. Seperti yang kita ketahui bahwa informasi mengenai investasi BUMN itu juga secara bertahap kita masukkan di dalam penyusunan RKP 2022.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi pengendalian, ini juga dilakukan pemantauan Renja KL melalui *E-monitoring* dan evaluasi termasuk pengembangan instrumen pengendalian pelaksanaan prioritas nasional. Ini ada dipilih beberapa prioritas nasional yang menjadi fokus perhatian di dalam kegiatan *monitoring* dan *evaluasi*.

Sedangkan peran dari pada *enabler*, ini Bappenas telah melakukan program pendidikan perencana S2 sebanyak 369 orang dan pelatihan teknis perencanaan sebanyak 1.888, ini pesertanya juga sebagian besar dari pemerintah daerah. Ini sesuai arahan dari Komisi XI pentingnya penguatan SDM perencana di tingkat daerah.

Demikian juga melakukan *piloting* untuk monografi desa dan juga inovasi pembangunan untuk memitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk di dalamnya adalah *coremap*, *blended finance*, *blue carbon* dan *bio economy*.

Selanjutnya sedangkan kinerja terkait dengan program dukungan manajemen. Di sini seperti kita ketahui bersama dan juga telah disampaikan oleh Bapak Menteri sendiri bahwa di Kementerian PPN/Bappenas termasuk

salah satu kementerian yang pertama kali menerapkan apa yang namanya *Integrated Digital Work Smart office* terutama pada saat awal-awal pandemi, Bappenas bahkan telah menerapkan sebelum pandemi itu terjadi.

Demikian juga dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk pencegahan Covid-19 di lingkungan Kementerian PPN. Jadi seperti sebelum dilakukan ada pertemuan protokol kesehatan seperti *tes swab* itu terus dilakukan. Demikian juga dengan dukungan manajemen dan peningkatan akuntabilitas. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

Ya terus. Capaian kegiatan 2021, nah ini terutama yang terkait dengan pertanyaan Nomor 5 dari apa Komisi XI, itu Pertama, yang terkait dengan evaluasi *major project*. Pertama yang terkait dengan prioritas nasional satu yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, ini juga *major project* industri 4.0 di subsektor prioritas yaitu makanan, minuman, tekstil, dan pakaian.

Sedangkan *major project* yang terkait dengan prioritas nasional yang Kedua yaitu terkait dengan *major project* untuk kawasan strategis nasional yaitu perbatasan dan hasilnya sejauh ini adalah *on track*.

Demikian juga untuk prioritas nasional yang Ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, itu berbagai indikator *major project* termasuk di dalamnya adalah integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh juga *on track* bahkan telah tercapai.

Demikian juga yang untuk prioritas nasional lima yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, indikator-indikator apa penyelenggaraan penggelaran jaringan tetap pita lebar pada prioritas *major project* transformasi digital juga telah apa tercapai.

Demikian juga dengan prioritas nasional yang ke enam yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Jadi di sini ada *major project* pembangunan fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini juga *on track* bahkan tercapai.

Sedangkan yang terakhir terkait dengan PN7 memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, ini berbagai indikator *major project* terkait dengan penguatan keamanan laut di Natuna juga telah tercapai.

Ini adalah beberapa contoh evaluasi *major project* yang telah dilakukan dan ini untuk merespon pertanyaan Komisi XI Nomor 5 ya.

Ya terus saja. Ini adalah beberapa dampak penerapan koridor pertumbuhan dan pemerataan terhadap disparitas Kawasan Timur Indonesia. Jadi kita bisa melihat bersama bagaimana laju pertumbuhan ekonomi untuk NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Seperti yang kita lihat

bersama bahwa laju pertumbuhan ekonomi untuk NTT, Maluku dan Maluku Utara serta Papua untuk Tahun 2021 itu jauh lebih tinggi dibanding Tahun 2020. Demikian juga untuk Indeks Pembangunan Manusia, ini juga terus mengalami peningkatan. Demikian juga untuk persentase penduduk miskin, ini beberapa lokasi ya sedikit mengalami peningkatan untuk angka kemiskinan di NTT, Maluku ya dan juga di Papua dan Papua Barat.

Terus saja. Secara garis besar bahwa sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, termasuk ini angka kemiskinan ini persis mendekati batas atas yaitu 9,7. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ini tercapai 3,51 dari targetnya 5%. Angka pengangguran ini bahkan jauh lebih kecil dari pada interval yang ditetapkan di dalam target 2021, targetnya adalah 7,7 sampai 9,1, capaiannya adalah 6,49%.

Sedangkan Rasio Gini di sini ada sedikit lebih tinggi daripada batas atas targetnya yaitu 0,381. Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun capaiannya ini masih lebih rendah dari pada target yang ditetapkan.

Sedangkan penurunan emisi gas rumah kaca, ini jauh lebih tinggi capaiannya dari pada target interval target yang ditetapkan yaitu 24,13%. Sedangkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan *alhamdulillah* ini melebihi target yang ditetapkan, di mana batas atas untuk NTP dan NTN adalah 104 tapi capaiannya adalah 105,68%, untuk Nilai Tukar Nelayan 105,6%.

Ya terus saja. Ini adalah beberapa informasi mengenai dampak stimulus terhadap capaian sasaran-sasaran pembangunan, baik itu yang terkait dengan kesehatan, perlindungan sosial, program-program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, insentif usaha, angka kemiskinan, angka pengangguran, Gini Ratio, dan juga Indeks Pembangunan Manusia. Jadi ini tentu berpengaruh terhadap berbagai apa sasaran pencapaian sasaran pembangunan yang baru saja kami sampaikan.

Terus saja. Ini adalah pencapaian prioritas nasional RKP 2021 apa hasil pemetaan RKP 2021 terhadap RPJMN. Secara umum berbagai indikator-indikator kegiatan-kegiatan yang telah kita petakan ini secara umum telah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024, baik itu yang terkait dengan PN1 yaitu kontribusi PDB pariwisata, penyediaan lapangan kerja pertahun, demikian juga dengan PN2 terkait dengan pertumbuhan PDRB KTI. PN3 terkait dengan SDM yaitu rata-rata lama sekolah dan juga perguruan tinggi yang masuk ke dalam *World Class University*.

Demikian juga yang PN4 indeks pembangunan masyarakat, PN5 adalah waktu tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau. Sedangkan yang PN6 ini indeks kualitas lingkungan hidup, persentase penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan yang PN7 indeks pembangunan hukum. Ini adalah beberapa contoh indikator yang tertuang di dalam RKP 2021 yang secara umum sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Terus saja. Ini adalah informasi mengenai apa *breakdown* pertumbuhan ekonomi per provinsi untuk Tahun 2020-2021. Seperti yang kita lihat Bagaimana Kuartal I sampai IV sampai untuk Tahunan 2020, bahkan Kuartal IV 2021. Jadi ini adalah data-data apa mengenai *breakdown* ekonomi per provinsi untuk Tahun 2020 dan 2021 dan ini tadi juga telah kami sampaikan bagaimana kondisi untuk provinsi-provinsi di KTI perkembangan pertumbuhannya.

Terus saja. Ini adalah pertumbuhan investasi yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran pembangunan. Jadi seperti yang kita lihat bersama perkembangan kumulatif investasi untuk Tahun 2020 bahkan 2021 ya.

Ya terus ini adalah kebutuhan investasi Tahun 2021 seperti yang kita lihat bersama bahwa kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar 5.817,3 triliun sampai 5.912,1 triliun dan seperti yang kita lihat bersama pada tabel *slide* berikut bahwa investasi pemerintah berkisar antara 5 sampai 7,1%, investasi BUMN 4,9 sampai 8,1 dan investasi swasta yang mayoritas yaitu 90,1 sampai 84,7%.

Terus ini adalah informasi-informasi yang terkait dengan PHLN 2021 dan Rencana 2022 yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas. Ada yang sifatnya pinjaman, ada yang sifatnya hibah. Jadi untuk pinjaman ada 7, sedangkan untuk hibah ada 5, sedangkan mengenai perkembangan antara pagu dan realisasinya seperti yang kita lihat pada kolom di tengah *Alhamdulillah* bahwa realisasi cukup tinggi, bahkan untuk beberapa *project* itu mendekati 100% yaitu 99,9%. Demikian juga untuk hibah, ini ada yang perkembangannya untuk *coral reef rehabilitation* itu bahkan realisasinya 99,4%. Sedangkan untuk rencana 2022 seperti yang tertuang di kolom paling kanan ya.

Terus saja, ini adalah capaian dan rencana pendanaan KPBU. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bauran pendanaan untuk RKP 2021 maupun 2022 seperti yang kita lihat di sini untuk KPBU adalah apa SPAM Jatiluhur, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Anggrek dan Bandara Hang Nadim. Ini secara keseluruhan ada estimasi nilai investasinya itu 95,3 triliun.

Ya terus, ini adalah beberapa contoh realisasi proyek KPBU hingga Tahun 2021, sekaligus ini adalah merespon pertanyaan Komisi XI, pertanyaan Nomor 12 yaitu ada yang sifatnya kategori operasi seperti sektor telekomunikasi dan Informatika, sektor jalan, sektor air minum dengan nilai investasi 89,61 triliun.

Sedangkan untuk konstruksi di sini seperti yang kita lihat bersama ada sektor apa untuk jalan, air minum, transportasi, ketenagalistrikan dan pengelolaan pengolahan sampah yaitu dengan nilai investasi 138,2 triliun. Demikian juga untuk yang statusnya *financial close* dan tanda tangan kontrak seperti yang kita lihat sehingga total nilai investasi sebesar 302,18 triliun.

Ya terus saja. Ini adalah beberapa kawasan prioritas RKP 2022, di mana bisa kita lihat apa menurut kepulauan. Di sini mulai dari Sumatera,

Jawa Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua. Jadi mulai dari KEK Arun untuk Sumatera, Bali untuk Borobudur, Nusa Tenggara Labuan Bajo, Kalimantan ini bisa kita lihat Maloy Batuta Trans Kalimantan, Sulawesi KEK Kawasan Industri Palu, dan juga Maluku Papua Teluk Weda ya. Ini adalah beberapa kawasan prioritas yang tertuang di dalam RKP 2022, sekaligus merespon pertanyaan Nomor 13 ya.

Terus ini adalah kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur dan teknologi prioritas untuk merespon pertanyaan Nomor 14. Seperti yang kita ketahui bersama beberapa sasaran pembangunan untuk Tahun 2022 seperti yang kita lihat bersama pada yang paling kiri dan arah kebijakannya, sedangkan yang terkait dengan infrastruktur teknologi dan prioritas strateginya adalah industri, meningkatkan nilai tambah pariwisata, mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Sedangkan untuk ketahanan pangan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Demikian juga untuk UMKM yaitu meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional.

Demikian juga selanjutnya untuk infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan keterampilan, dan yang terakhir adalah reformasi sistem kesehatan nasional.

Ya terus saja. Ini adalah informasi mengenai perkembangan dan kesiapan ibu kota negara di dalam *major project* yang saat ini juga sudah tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah, khususnya untuk merespon pertanyaan Nomor 15.

Dapat kami laporkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tertuang di sini ini sifatnya adalah penyiapan berbagai peraturan perundangan sebagai turunan dari pada Undang-Undang IKN. Demikian juga dengan perencanaan dan penyiapan lahan dan yang tidak kalah pentingnya adalah penyiapan SDM-nya.

Ya terus saja. Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 ini ada dua komponen besar. Ini adalah terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran dan yang kedua adalah alokasi anggaran ya.

Terus Ibu Bapak yang kami hormati, Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2022 yaitu 1,375 triliun ya, demikian juga dengan rincian mulai dari rupiah murni, pinjaman dan hibah. Jadi ini sudah dicoba perinciannya, baik itu yang terkait dengan program-program perencanaan pembangunan nasional dan program dukungan manajemen dan ini alokasinya bisa kita lihat pada komponen yang paling bawah.

Ya terus saja. Ini adalah Pagu Alokasi Anggaran. Kalau kita kelompokkan sesuai dengan jenis belanja pegawai, barang, dan modal yaitu seperti kita lihat bersama untuk belanja barang *share*-nya 78,7% dengan nilai 1,082 triliun. Sedangkan untuk pegawai *share*-nya adalah 14,9% dengan nilai

nominalnya 204 miliar. Demikian juga untuk belanja modal *share*-nya adalah 6,5% dengan alokasi 88,8 Miliar. Ya, terus.

Barangkali itu Ketua, Pimpinan dan Anggota yang bisa kami Laporkan sampaikan mengenai Evaluasi Capaian dan Rencana Kerja Tahun 2022 untuk Kementerian PPN Bappenas. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya saya mohon izin Ibu Amalia Wini akan melanjutkan Bu.

Yang 2022 belum ? silakan, oh sudah.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Taufik. Masih ada yang mau ditambahkan Pak Menteri ?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Belum ada.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri, Pak Taufik dan seluruh jajaran Bappenas. Saya kira itu tadi Paparan yang sudah disampaikan kepada kita semua terkait dengan agenda Rapat Kerja kita pada hari ini yaitu Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 serta Rencana Kerja Tahun 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan seperti biasa selanjutnya kita lakukan pendalaman.

Saya berikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan yang pertama. Silakan, silakan langsung Pak. Pak Marsiaman atau Bang Inton ? atau sudah tidak ada yang mau bicara ? ya Bang Inton katanya. Oh baru datang, belakangan kalau gitu.

Silakan Pak Misbakhun atau Mbak Puteri ya. Puteri silakan.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Kalau perintah dari Pak Misbakhun harus langsung kita jalankan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota Komisi XI yang terhormat.

Pak Menteri, Pak Suharso beserta seluruh jajaran dari Bappenas, sehat selalu *Insyah Allah* kita semua dalam lindungan-Nya.

Yang Pertama, terkait dengan IKN Pak. Ini isu paling menarik memang saya menunggu-nunggu saatnya bertemu Pak Menteri ini untuk langsung tanya soal ini. Kita menyimak betul pidato dari Pak Harso ketika menyampaikan Pandangan Akhir Pemerintah terkait dengan RUU IKN pada Sidang Paripurna kemarin yang menyebutkan Ibu Kota Negara baru ini nantinya akan menjadi kota dunia untuk semua dan juga sekaligus menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di tengah nusantara.

Jadi semoga visi besar ini nanti bisa didasari juga dengan perencanaan yang matang dan tentu *visible*, terukur, teliti, cermat dan hati-hati, serta paling penting terintegrasi dan juga menyeluruh itu harapan besar dari kami, karenanya saya yakin Pak Harso selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah ujung tombak dari perencanaan IKN ini dan harus memastikan juga agar *masterplan*-nya nanti bisa menjadi rencana detail yang berpedoman pada prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan.

Dan tentu kita juga ingin nanti persoalan-persoalan yang selama ini selalu dibawa ke publik oleh banyak pihak seperti kebutuhan pendanaan agar tidak menambah beban APBN misalnya, lalu pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga IKN nantinya dan juga pengendalian dari pembangunan di sekitar kawasan IKN supaya alih fungsi lahannya bisa kita kontrol dari sekarang, dan beberapa permasalahan lain sampai dengan harga yang katanya sekarang harga tanah 10 kali lipat lebih mahal Pak. Jadi sudah pasti saya nih sama generasi saya sudah tidak bisa lah beli tanah di sana karena sudah terlalu mahal.

Jadi kita berharap Bappenas bisa memastikan *masterplan* IKN ini terintegrasi dari hulu ke hilir antar instansi vertikal dan horizontal, dan juga memperhatikan kesiapan pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan. Termasuk ketika kita merencanakan IKN ini juga kita harus memastikan konstelasi wilayah terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya.

Jadi nanti IKN ini bisa menjadi lokomotif dalam perekonomian Pulau Kalimantan dan nasional. Jadi semoga *masterplan* IKN itu tidak hanya bersifat dokumen fisik, tapi juga menjadi pegangan dan pedoman kita dalam tahapan pembangunan IKN ke depannya.

Dan yang ingin saya tanyakan juga adalah rencana Pak Harso beserta seluruh jajaran dari Bappenas untuk Jakarta ke depannya, karena kita tahu nantinya Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan kebetulan senior di belakang

saya ini perwakilan dari DKI Jakarta yang saya yakin juga sangat penasaran terkait dengan rencana dari segi pengembangan wilayah dan juga.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Saya juga Put.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Arah pengembangan wilayah, oh iya sama Bu Anis mohon maaf. Ada dua Pak di sini soalnya yang perwakilan dari DKI Jakarta.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ada tiga Bu Puteri.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Oh iya ada tiga, mohon maaf. Ini saking gantengnya jadi kadang-kadang suka terlalu *shining* gitu Bang Inton dan semoga DKI Jakarta ini tetap bisa menjadi wilayah metropolitan terbesar satu wilayah metropolitan terbesar di dunia.

Dan yang Kedua, terkait dengan peran kawasan strategis yang tadi sudah dipaparkan juga. Di sini Bappenas menyebutkan kebutuhan investasi yang diperlukan pada Tahun 2021 mencapai sekitar 5.000 triliun. Nah saya ingin menanyakan sejauh mana kontribusi dari setiap kawasan yang tadi sudah dipaparkan mulai dari KEK, KI dan juga KPBPB dan juga destinasi prioritas dalam mengejar target investasi tersebut, karena tentu kita berharap pusat-pusat pertumbuhan ini harapannya bisa menggenjot penerimaan investasi seperti yang ditargetkan oleh Bappenas dan juga seberapa besar kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 sampai 5,5% pada tahun ini.

Dan Bappenas juga tadi telah menyampaikan realisasi proyek yang didanai oleh KPBU. Yang ingin kami tanyakan sudah sejauh mana skema KPBU ini diterapkan untuk pembangunan kawasan prioritas, karena tentu APBN saja kita tahu tidak akan mampu untuk membangun konstruksi sampai dengan operasionalisasi dari kawasan prioritas ini dan kita juga perlu memastikan kawasan prioritas ini dapat terbangun sebagaimana mestinya untuk menarik investasi dan juga mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Dan yang terakhir selain RPJMN yang akan berakhir pada Tahun 2024, kita juga tentu perlu menyiapkan rencana pengembangan pembangunan jangka panjang nasional yang nanti akan berakhir di Tahun 2025 yang merupakan dokumen pembangunan nasional dalam rentang tahun 20 tahunan. Apakah Bappenas sudah mulai ada pembahasan mengenai hal ini dan seperti apa evaluasi pelaksanaan RPJPN pada Tahun 2005 sampai 2025 kemarin ?

Demikian Pak Amir dari saya. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Mbak Puteri. Dari Gerindra kayaknya agak Pak Hergun saya lihat di layar ini.

F-P.GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Diperdalam oleh Pak Samad Pak. Silakan Pak Kamru.

KETUA RAPAT:

Pak Kamru silakan Pak Kamru atas perintah Pak Hergun.

F-P.GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Beliau perintahkan kita laksanakan.

Terima kasih Pimpinan dan Anggota, Bapak Menteri PPN dan Kepala Bappenas beserta seluruh jajaran.

Semoga sehat selalu Pak kami doakan Pak. Bapak ini tokoh umat, pemimpin, Sutradara IKN, jadi jangan sampai sakit Pak. Kita ikut khawatir kalau sampai Bapak kurang sehat.

Pertama-tama menyampaikan terima kasih atas paparan dan bersyukur pencapaian yang telah dicapai di Tahun 2021 dan di dalam tugas perencanaan Bappenas ada sejumlah kegiatan termasuk Rakor dengan gubernur. Ini terus terang Pak, kami mau menyampaikan saya dari daerah pemilihan DKI sudah tahun ketiga itu enggak pernah dapat undangan dari Gubernur DKI. Jadi mungkin melalui nggak tahu kalau Bu Anis dengan Pak Masinton, nggak pernah juga ? Nggak pernah juga. Jadi mungkin melalui kementerian karena kami ketika Reses permasalahan di lapangan itu tak sangat teknikal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Jadi mungkin melalui kementerian yang bisa membantu menghadirkan teman-teman sesuai dengan daerah pemilihannya. Terima kasih.

Kemudian yang Kedua, *tagline* THIS mulai dari tematik ya, tematik, holistik integratif, dan spasial. *Wah* ini luar biasa ini, betul-betul kalau ini bisa dilaksanakan saya optimis dengan multipihak dengan semua pihak *major project* kita akan bisa lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan juga tepat prosedur dan juga tepat waktu.

Kemudian jadi kalau boleh Pak sosialisasi tematis ini tematik, holistik, integratif ini menjadi *tagline* kita. Jadi Komisi XI bertemu dengan Bappenas itu

temanya THIS gitu, supaya ke depannya itu menjadi kekuatan. Jangan sampai seperti Kementerian Keuangan Pak Menteri, temanya di atas *spending better* tetapi kepala daerah di bawah belanjanya di kuartal ketiga, keempat Pak. Jadi nggak ketemu gitu antara tema di Kementerian Keuangan dengan implementasi kinerja dari kepala daerah yang menerima TKDD. Jadi itu kita agak karena kenapa, tidak ada sosialisasi, tidak ada terhadap apa yang pesan-pesan yang harus dicapai dalam setiap target program pemerintah.

Kemudian selanjutnya trilateral. Nah kami ingin mohon penjelasan dari Pak Taufik sejauh mana efektivitas, karena tahun lalu kan ada keluhan. Nah, sejauh mana nih Kementerian Keuangan ? Komisi XI sudah mengubah ini Pak Menteri formatnya, selain menteri Menteri Keuangan juga kami sudah menjadwalkan per dirjen. Jadi ke Eselon II-nya sudah hadir di tempat ini per dirjen. Kita Eselon I dan Eselon II sudah hadir di sini. Jadi sudah betul-betul sudah untuk merespon keluhan dari sejumlah Menteri yang selama ini merasa bahwa dalam trilateral itu tidak equal antara pelayanan atau komunikasi atau pada saat rapat-rapat dengan Kementerian Keuangan.

Jadi Komisi XI proaktif merubah formula rapat dengan Kementerian Keuangan. Nah kami apakah masih ada kendala sepanjang 2021 dalam penerapan trilateral ini sehingga kita bisa memastikan target pencapaian kita, bisa kita harapkan sesuai dengan yang kita sepakati dalam makro ekonomi kita.

Kemudian selanjutnya, ada satu saya mau titip Pak. Semua kementerian bicara UMKM, boleh nggak ini Bappenas menjadi *leading sector* seperti yang dilakukan di KBPU sebagai Kepala sekretariat. Bayangkan semua Kementerian Keuangan bicara UMKM, bukan cuma kementerian, lembaga juga bicara UMKM. BI, OJK, semua bicara UMKM, tetapi, tetapi mohon maaf tidak jelas parameter dari mikro ke kecil berapa yang naik kelas, dari kecil ke menengah berapa yang naik kelas dari aspek kelembagaan, dari aspek teknologi, dari aspek produksi, dari aspek jangkauan pasar, dari aspek pengelolaan manajerial keuangan dan sumber daya manusianya Pak. Boleh *nggak* ini masuk di Rencana Kerja Prioritas di 2023 Pak Menteri, kalau ini apalagi Presiden bulan lalu pidato Pak semua harus memberikan 30% alokasi pembiayaan UMKM dan semua bicara sampai Bea Cukai juga bicara UMKM, Pajak juga bicara UMKM, tetapi mohon maaf kalau struktur ekonomi kita masih terus mengandalkan UMKM, tidak terintegrasi dengan kelembagaan korporasi, saya *agak pesimis* kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045 lima besar ekonomi dunia kalau kita mengandalkan *small medium enterprise* terus akan naik, kalau boleh ini dimasukkan.

Kemudian usulan yang terakhir yang kami mau masukan juga di dalam kawasan prioritas di 2023 yaitu Jakarta Pak Menteri, kalau bisa diambil alih ini *di-lead* ini menyangkut Revisi Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Jakarta, sehingga semua KL nanti dikoordinasi oleh Bappenas sehingga betul-betul kita bisa membawa Jakarta masa depan yang lebih baik pasca ibu kota dipindahkan. Nah ini kalau boleh dimasukkan dalam program kerja kawasan prioritas di 2023.

Sementara itu Pimpinan. Terima kasih, saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kamru dari Fraksi Gerindra. Seperti biasa lanjut ke Fraksi Nasdem. Pak Satori silakan.

F-P. NASDEM (SATORI, S.Pdi., M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan Rapat, Pimpinan Komisi, Bapak Ibu Anggota Komisi XI. Pak Menteri, Pak Harso beserta para Dirjen.

Sedikit Pak Menteri yang coba kami akan menyikapi, yang Pertama, itu kalau kita lihat pada *slide* Halaman 6, itu kinerja program perencanaan pembangunan nasional Tahun 2021 pada terselenggaranya peran *enabler* atau pemampu salah satunya antara lain pilot monografi desa melalui aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu) di 95 desa, 9 kabupaten kota, 5 provinsi. Kemarin waktu rapat dengan Bu Menteri Keuangan jumlah penduduk miskin ekstrim Tahun 2021 adalah 10,86 juta orang, padahal secara khusus pemerintah telah menetapkan strategi jangka menengah 2021-2024. Untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, SEPAKAT ini kan sudah diluncurkan dan beberapa tahun lalu. Sejauh mana Pak kinerja SEPAKAT ini dapat menurunkan kemiskinan ekstrim ?

Kemudian saya lihat di Halaman 2 Pak, kawasan prioritas RKP 2022 untuk Pulau Jawa salah satunya adalah Kawasan Industri Terpadu Batang. Tahun lalu PT KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma) mendapat PMN sebesar 977 Miliar untuk Kawasan Industri Batang, lalu berapakah nilai yang akan dikeluarkan Bappenas untuk Kawasan Industri Batang tersebut ?

Kemudian saya lihat di Pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar 1,75 triliun dengan rincian belanja pegawai sebesar 204,6 miliar, belanja modal 88,8 miliar dan belanja barang sebesar 1,82 triliun, 1,082 triliun. Penyerapan Anggaran 2021 kan masih ada sisa Pak sebesar 37 miliar. Apakah ditambahkan ke pagu ? Kemudian mengingat kasus Covid-19 sekarang ini sedang naik, apakah ada yang bisa dihemat Pak dari ketiga *item* tersebut ?

Kemudian Pasca Undang-Undang IKN ditetapkan, seperti apa Pak progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur ? Pasca DKI Jakarta yang tadi banyak disinggung-singgung juga sama Mbak Puteri tidak lagi menjadi ibu kota negara Pak, dampaknya bakal terasa di sektor konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di Jakarta yang diperkirakan akan menurun. Pasalnya industri padat karya diperkirakan akan angkat kaki dari Jakarta dan menurun. Pasalnya industri padat karya tentunya dan kota satelit lainnya Pak serta konsumsi rumah tangga juga diperkirakan menurun seiring nanti dipindahkannya PNS, TNI, POLRI. Padahal selama ini Kadin DKI mencatat tingkat konsumsi rumah tangga di Jakarta juga turut

mempengaruhi kinerja wilayah lain Pak, yakni Jawa sebesar 21%, Bali, Nusa Tenggara 7%, Kalimantan 6%, Sumatera 5% dan Sulawesi Papua 4%.

Tak hanya di DKI Pak, pemindahan IKN itu juga mempengaruhi daerah lain karena mereka berkepentingan besar terhadap Jakarta, karena merupakan pusat dan aktivitas ekonomi dan jasa tanah air.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Tahun 2019, pusat perdagangan di Jakarta berkontribusi 20% terhadap PDB sektor perdagangan. Begitu juga Pusat Jasa Keuangan berkontribusi 45%, Pusat Jasa Perusahaan sebesar 68% terhadap nasional, Pusat Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan sebesar 49%, Pusat Jasa Pendidikan sebesar 27%, dan Pusat Industri Pengolahan 10%. Secara nasional DKI Jakarta menyumbang 17,23% terhadap produk domestik atau bruto tanah air pada Kuartal II 2021.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pasca pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Nusantara, seperti apa Pak *planning* Bappenas terhadap nasib atau masa depan DKI Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara ?

Kemudian seperti apa Pak skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut Bappenas ? karena kalau hanya berharap dari APBN tentunya akan sangat membebani APBN. Kita yang saat ini masih fokus terhadap pembiayaan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Seperti apa Pak *planning* Bappenas untuk memindahkan ASN dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, termasuk bagaimana infrastruktur permukiman ASN di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ? apakah nasib-nasib ASN nanti yang dipindahkan ke sana itu akan dibuatkan rumah dinas atau disiapkan oleh negara atau lainnya Pak ?

Kemudian kami juga ingin mendapatkan paparan penjelasan dari Pak Kepala Bappenas seperti apa Pak strategi yang ditawarkan Bappenas dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk pasca Covid-19 nanti ?

Itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Pimpinan Komisi. Kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Satori.

Dari Fraksi PKB ada ? tidak ada ya, dari Demokrat ?

F-PD (HARMUSA OKTAVIANI):

Harmusa Pak.

KETUA RAPAT:

Harmusa ya?

F-PD (HARMUSA OKTAVIANI):

Iya.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (HARMUSA OKTAVIANI):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati.
Pak Menteri beserta jajaran.

Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan sangat komplit.

Pertama-tama, saya ingin menyoroti stimulus dan program pemulihan ekonomi pada Tahun 2021 yang realisasinya sekitar mencapai 658,6 triliun atau sebesar 88,4% dari pagu. Bila kita lihat capaiannya yang tadi juga dipaparkan, itu ternyata untuk keperluan sembako PKH dan program-program lain yang diturunkan oleh masyarakat untuk masyarakat kita.

Yang ingin saya tanyakan adalah perbandingan jumlah penerima dan target angka persebaran penduduk itu masih sangat belum merata untuk pencapaian Tahun 2021. Nah untuk tahun ini bagaimana Bappenas mengupayakan agar target-target tersebut bisa tercapai sesuai dan dengan pemerataan yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita karena banyak daerah-daerah yang merasa sangat belum bisa merasakan manfaat dari program-program pro rakyat tersebut. Mungkin di tahun ini Bappenas bisa merencanakan strategi yang sangat-sangat optimal agar masyarakat kita yang merasa belum menerima manfaat dari program-program itu di tahun ini mereka bisa merasakan seperti masyarakat di daerah lain.

Kemudian terkait kebijakan serta mitigasi dampak wabah pada sektor pariwisata Tahun 2022, sejauh apa implementasi strategi terutama di Bali, Bali Smart Island, di mana Bali akan memiliki 100% cakupan digital dengan kualitas jaringan prima. Di mana Bali diharapkan menjadi destinasi *startup global* serta memiliki sistem digital yang sangat bagus.

Yang ingin saya tanyakan apakah sejauh ini hal tersebut sudah terimplementasi dengan baik dan bagaimana strategi Bappenas untuk

memaksimalkan mengoptimalkan pariwisata di Bali ini agar ini benar-benar bisa dimanfaatkan negara?

Kemudian terkait Program Compact-2 Hibah MCC akan dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian program prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ini bagaimana prosesnya dan sampai manakah proses ini dan apakah nantinya di tahun ini kita sudah bisa melihat kurva pertumbuhan program RPJMN ini ?

Yang terakhir tentunya yang sangat menjadi sorotan kita semua adalah terkait pembangunan IKN. Pembangunan IKN ternyata masuk dalam wilayah konsesi dan Pak Menteri juga menyatakan baru-baru ini baru mengetahui hal tersebut dalam beberapa hari yang lalu. Ini sangat menjadi kritik tertentu bahkan pembangunan lahan-lahan juga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan kami juga menyoroti koordinasi KL ini sangat rendah dan mungkin harus benar-benar ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun kesalahpahaman di kemudian. Ini juga merupakan bukti bahwa studi kelayakan kurang berjalan dengan baik.

Kami ingin menanyakan penjelasan terkait hal tersebut, apakah benar-benar IKN ini siap untuk kita bangun dan ibu kota siap untuk kita pindahkan ke Kalimantan ?

Mungkin itu saja pendalaman dari saya. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Harmusa dari Fraksi Demokrat. Lanjut dari PKS, silakan Bu Anis.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Amir Uskara, Pak Hatari

Teman-teman Komisi XI

Pak Menteri, kurang sehat ya Pak ? *Masya Allah* mudah-mudahan cepat sembuh *syafahullah syifaan ajilan*

Dan juga seluruh jajaran dari Pak Menteri, mudah-mudahan sehat selalu.

Memang sedang tinggi beberapa Komisi sudah *lockdown*. Ini Pak Amir kita kapan ini *lockdown* ?

Ya, terima kasih Pak Menteri. Saya akan melihat *slide* Nomor 11 tentang Capaian Sasaran Pembangunan Tahun 2021 ya. Pertumbuhan ekonomi sudah *oke*. Saya mau soroti yang Nomor 2 ini tentang kemiskinan. Ya kita tentu bahagia berbangga bahwa di tahun ini kita sudah kembali ke *single digit* ya setelah waktu pandemi kemarin itu luar biasa peningkatannya cukup dahsyat, tapi kita sekarang kita sudah normal kembali, bukan normal

ya sudah turun menjadi *single digit*. Tapi saya ingin bertanya atau mengkonfirmasi kepada Pak Menteri perkembangan sekarang bagaimana ?

Saya membaca data dari Bank Dunia di Tahun 2019 ini berarti sudah mulai masuk masa pandemi ya Pak Menteri ya. Ini data yang *second opinion* lah kalau buat saya *second opinion* untuk melihat bagaimana kondisi Indonesia di mata, di mata dunia di mata Bank Dunia.

Berdasarkan data dari Bank Dunia, memang kalau kelompok yang di atas garis kemiskinan itu kan ukurannya pendapatan per kapita per bulannya itu 454.625,-. Nah kemudian ada kelompok yang dianggap di atas garis kemiskinan, di atas garis kemiskinan tetapi belum memiliki keamanan secara ekonomi yang disebut di Bank Dunia itu *aspiring middle class*. Nah itu pendapatannya, pengeluarannya ya pengeluarannya itu 532.000,- sampai dengan 1,2 juta per orang per bulan. Jadi dia sudah di atas ya, tetapi belum aman betul, belum memiliki keamanan ke ekonomi yang artinya cepat atau lambat atau secara tiba-tiba dia bisa masuk ke bawah garis kemiskinan. Itu jumlahnya 115 juta atau 45%. Jadi di atas garis kemiskinan ada *aspiring middle class* yang jumlahnya 115 juta atau 45%. Nah kemudian di bawah *aspiring middle class* ini yang pengeluarannya 354.000,- sampai dengan 532.000,- ya itu jumlahnya 25% atau 62 juta. Jadi kalau ditotal seluruhnya ini dari yang *aspiring middle class* kemudian di bawahnya ya itu mencapai 70% atau 170 juta. Artinya walaupun yang 170 juta ini di atas garis kemiskinan, tetapi belum aman secara ekonomi begitu. Artinya sewaktu-waktu mereka bisa saja masuk garis kemiskinan dan ini kan data ini tidak boleh kita abaikan gitu.

Nah yang saya ingin konfirmasi kepada Pak Menteri di tahun ini perkembangannya bagaimana ya sebagai *second opinion* dan saya yakin bahwa upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah bansos dan sebagainya dan anggarannya juga sudah ada, tetapi dengan menyimak ini ada memang kalau dilihat dari lapangannya memang masih banyak Pak Menteri penduduk Indonesia yang betul-betul miskin dan membutuhkan perhatian dari kita.

Kemudian untuk Data Indeks Pembangunan Manusia. Ini yang Nomor 5 ya. Indeks Pembangunan Manusia ini kalau kita lihat untuk Indonesia capaiannya 72,29% ya, targetnya 72,78 sampai 72,95, realisasinya 72,29. Jadi memang sedikit di bawah target. Memang kalau kita bedah untuk per provinsi, untuk provinsi ini memang cukup lumayan per disparitasnya begitu ya. Jadi sebagian besar provinsi Indonesia ini kalau saya hitung ada 23 provinsi dari 34 provinsi ini yang berada di bawah IPM rata-rata nasional. Jadi cukup besar 23 provinsi dari 34 provinsi itu IPM-nya masih di bawah IPM nasional ya dan ada 10 provinsi yang masih berstatus sedang yang harus menjadi perhatian untuk segera ditingkatkan ya. Lampung, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat ya, Papua jelas yang terendah. Dan provinsi yang tergolong tinggi bahkan tertinggi itu DKI Jakarta nilai IPM-nya di atas nasional 81 ya koma.

Ya ini tentu menjadi perhatian kita semua dan ini saya hubungkan dengan tingkat kemiskinan tadi gitu, sepanjang tingkat kemiskinan kita itu masih terus seperti ini, itu akan mempengaruhi tingkat IPM kita ya. Jadi sebagai Menteri yang merencanakan kemudian mengkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain yang tentang hal ini sangat kita harapkan.

Kemudian Pak Menteri ini terkait sekarang dengan KEK Kawasan Ekonomi Khusus ya. Di Tahun 2021 pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi di KEK itu sebesar 6,4%, kemudian ekspor 4,5%, import 5,9% sebagai target sebagai penopang target pertumbuhan ekonomi 5% pada tahun ini. Nah sampai dengan Desember 2021 Indonesia telah memiliki 19 KEK yang terdiri dari 11 ya KEK industri, kemudian 8 sisanya adalah KEK pariwisata ya. Dari daftar tersebut baru 8 KEK industri yang sudah beroperasi dan sisanya masih dalam tahap pembangunan. Lebih lanjut biaya yang telah dikeluarkan belum memberi dampak positif bagi perekonomian.

Nah melansir laporan tahunan Dewan Nasional KEK 2020 yang menunjukkan dari total komitmen investasi sebesar 70,4 triliun di seluruh KEK, realisasinya hanya mencapai Rp23,1 triliun sampai Desember. Nah ini mohon tanggapan dari Pak Menteri ya.

Nah kemudian meskipun KEK ini memberikan banyak manfaat secara sosial ekonomi, namun ada beberapa permasalahan mendasar yang muncul misalnya perusahaan yang terdaftar di KEK ini memang menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi pekerjaan tersedia hanya membutuhkan kemampuan dasar dan dianggap tidak memberikan kesempatan luas bagi tenaga kerja untuk mengembangkan dirinya, sehingga cita-cita *spillover* dengan menggunakan teknologi tampaknya sulit untuk dicapai, yang kemudian sulit untuk menentukan dan mengevaluasi apakah KEK telah menciptakan keterkaitan ke belakang atau *backward linkage* dengan industri lainnya di suatu negara bahkan satu kawasan ya. Jadi KEK ini kami mohon perhatiannya.

Kemudian kemarin saya bersama Pak Amir sudah meninjau lokasi IKN Pak Menteri di Penajam Paser Utara kita berhenti di titik nol ya, sayang Prof. Hendrawan nggak bisa ikut. Jadi kawasannya 260.000 hektar, kami ditemani oleh Kanwil BPN kemarin ya. Angkanya bombastis, disebutlah ya ini kan berarti *valid dong* karena dari Kanwil, 300% harga tanah itu naik di sana, ya dan ternyata banyak yang sudah invest di sana, termasuk para artis ya banyak di sana. Dan kemudian memang satu sisi memang *keep on* ekonomi akan tumbuh jelas ya ketika ada dan pembangunan ini sepertinya tidak bisa cepat ya Pak Menteri ya, 2045 targetnya. Jadi saya melihat ada beberapa prioritas di sana juga kami sudah melihat memang ini saya bicara begini karena memang sudah dibahas undang-undang jadi sudah selesai gitu loh.

Pak Kamru, kami menolak Pak Menteri ya, tapi sudah diketok di DPR dan kita menghargai demokrasi gitu bahwa ini sudah selesai, nggak ada perdebatan itu, tapi kita harus kawal. Saya yakin Pak Menteri juga apa namanya selain sebagai Menteri kan juga sebagai intelektual yang melihat bagaimana progres IKN ini gitu ya, studi kelayakannya dan sebagainya dan

ketika melihat saya dari Balikpapan dengan Pak Amir itu 2 jam ya kita 1,5 jam dengan kondisi yang saya mabuk-mabuk Pak Menteri, sampai mual, sampai pusing gitu, berkelok-kelok dan sebagainya. Memang dari sisi itu ya saya mikir ini siapa nanti yang akan pindah ke sini gitu ya dan ini apa ini betul kita kawal dan ini adalah kalau sudah diketok palu tugas sekarang adalah bagaimana Pak Menteri mengawal proses ini sebagaimana yang dicita-citakan bahwa ini memang untuk betul-betul membuat apa namanya tidak hanya sekedar *legacy* gitu ya, tetapi bagaimana ini bisa bermanfaat dan betul-betul bisa mengangkat ekonomi Indonesia. Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bu Anis. Kemarin saya sama-sama di titik Nol Pak Menteri dan Bu Anis sudah kasih naik jempol, sekalipun Fraksinya kemarin menolak dalam persetujuan undang-undang. Ya kemarin sama Pak Hatari juga di IKN.

Terima kasih Bu Anis dan teman-teman. Selanjutnya dari PAN ada ? Tidak ada ya, dari P3 ada yang mau ngomong silakan Bu Wartiah.

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi XI beserta Rekan-rekan Komisi XI. Yang kami hormati Bapak Menteri PPN dan Ketua Bappenas serta jajarannya.

Saya kira yang pertama.

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Ketua Umum dong Ketua Umum.

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd):

Eh Ketua Umum, Ketua Umum. Saya langsung saja ya, karena sudah dipaparkan secara apik tadi dan lengkap tentu saja berbicara masalah evaluasi tentu ada capaian-capaian kinerja yang harus dilihat dan *Alhamdulillah* serapan anggaran Tahun 2021 ini 96,80%, bahkan kalau hibah 15,95 m itu di dalam proses penyelesaian bisa mencapai 98,24% dibanding 2020 - 91,71% dan kami mengapresiasi beberapa kinerja-kinerja lainnya yaitu bagaimana angka kemiskinan yang menurun, kemudian juga menurunnya angka tingkat keterbukaan pengangguran terbuka. Tetapi kami lebih fokus ingin memberikan apresiasi juga atas disahkannya Undang-Undang IKN

sebagai landasan hukum ibu kota baru pada Tanggal 18 Januari 2022 dan menurut kami ini luar biasa karena saya melihat perkembangannya yang awalnya terlihat pesimis, tetapi sekarang di media itu optimis. Optimis itu didasari kepada fakta-fakta bahwa *Insyah Allah* dengan visi yang jelas IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia yang berkelanjutan. Kota ini juga akan menjadi simbol keberagaman Indonesia dengan nama Nusantara.

Terus terang Bapak Menteri, kami mendapat banyak sekali masukan-masukan apa dukungan dengan nama Nusantara itu merepresentasi semua wilayah di seluruh Indonesia.

Dan yang terakhir saya melihat perkembangan kemarin sudah wara-wiri ini Pengurus Besar NU akan mencari tempat pembangunan Gedung Kantor PBNU di sana. Ini artinya dukungan-dukungan seperti itu akan berdampak sangat positif, apalagi baru hari ini saya mendengar rekan kami sahabat kami dari PKS sudah memberikan jempol, setelah ini sudah selesai ya setelah Undang-Undang IKN ini diselesaikan dan ini artinya fakta-fakta yang perlu kita hargai bersama bahwa apa namanya awal berbeda tetapi begitu melihat fakta-faktanya akan ke depan punya prioritas program yang bagus, maka *Insyah Allah* ini akan berdampak sangat positif.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Ibu Wartiah, kemarin jempol itu, itu *refleks*, semua waktu photo itu ngasih jempol. Artinya karena *refleks* semua jempol saya nggak begitu itu mikir juga saya itu akhirnya.

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd):

Tidak apa-apa, politisi bijaksana itu adalah bisa menempatkan diri pada tempatnya, ini termasuk politisi bijak karena sekarang kita adalah masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab penuh bagaimana IKN ini sukses ke depan.

Saya kira hanya itu saya berdoa, mudah-mudahan kita doa kita bersama-sama Bapak Menteri cepat pulih seperti sediakala karena tanggung jawab IKN ini di pundak Bapak beserta jajaran, tentu juga bersama kementerian lembaga yang terkait. Saya kira itu saja dari kami. Mudah-mudahan ke depan akan dilancarkan semua proses-proses itu.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq.
Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bu Wartiah dari Fraksi P3. Dari PDIP silakan. Pak Marsiaman silakan, *oh* sebelum Prof, Pak Marsiaman dulu.

F-PDIP (MARSIAMAN SARAGIH, S.H.):

Sebelum Prof, saya dulu Pak dikasih kesempatan. Kalau Prof nanti lebih mendalam lagi.

Pak Menteri, jadi kalau soal saya hanya mau bicara soal rencana kerja ke depan Pak. Di sini dalam Poin 7 adalah penyusunan *masterplan food estate*, salah satu daerahnya itu adalah di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, NTT, Sumatera Selatan dan Papua.

Nah yang selama ini yang sudah dilaksanakan itu Pak belum terasa itu di lingkungan masyarakat Pak *food estate* itu seperti apa *gitu, enggak ngerti* juga masyarakat Pak. *Nah* sementara infrastruktur di sana pun amburadul. Jangankan mobil umum Pak, traktor saja susah lewat, saking lobang-lobangnya itu kebanyakan. Traktor biasanya jalan rusak juga dia bisa lolos, itu enggak. Jadi *food estate* yang seperti apa ini di mana ribuan hektar lagi pengakuannya, tapi kita yakin Pak ini tentu rencananya pasti positif.

Kalau hanya untuk kebutuhan dalam negeri yang dibuat diusahakan di sana *kayaknya* kurang bisa juga memenuhi keinginan atau cita-cita dari pada program *food estate* ini Pak, karena harga di dalam negeri itu selalu dimainkan Pak oleh para para pedagang-pedagang yang berkaitan dengan hasil bumi. *Nah* bagaimana soal pemilihan tanaman-tanaman tadi ?

Ya kalau memang hanya untuk kepentingan dalam negeri yang ditanam ya yang memang kebutuhan dalam negeri, ini yang ditanam kentang Pak, sementara yang makan kentang di Indonesia ini paling berapa persen dan belum tentu mampu. *Nah* ke Singapura saja itu belum masuk kentang Indonesia itu, gimana dia nanti akan memasarkan itu ?

Jadi hal-hal seperti itu memang kelihatannya kecil Pak, tapi setelah itu nanti minta ampun semua bubar di tengah jalan, tapi yang punya lahan sudah punya sertifikat, sehingga dia sendiri yang nanti akan menguasai dan akan membuat keinginannya sendiri, bukan lagi terpadu seperti terkoordinasi seperti rencana tadi.

Jadi mudah-mudahan *masterplan* ini menyangkut ke infrastruktur Pak dan kemudian di sana itu *nggak* semua itu air hujannya merata Pak, ada yang kering, ada yang dan dia bergunung-gunung. Ada yang 1.300 meter di atas laut, ada yang hanya 400 dan itu beragam Pak. Jadi dan ada juga di daerah Sumatera Utara itu *nggak* kebagian. Orang sedang mempetak ribuan hektar di sana, 1 hektar juga *nggak* ada yang masuk ke program *food estate* ini.

Jadi kami mengharapkan sekali *masterplan* ini memang betul-betul mensejahterakan dan menghasilkan dan mendukung perekonomian terutama di bidang hasil bumi Pak, karena dari dulu Sumatera Utara itu adalah pemasok hasil apa sayur-mayur ke Malaysia dan Singapura Pak.

Kemudian masalah Rencana Kerja RPJPN ini dan RPJMN yang Tahun 2025 akan dilaksanakan. Tolong diperhatikan juga Pak dipertimbangkan

perubahan hasil Pemilu serentak Tahun 2024. Jangan sampai kacau nanti karena kepala daerahnya juga baru, dia juga milih kepala dinasnya baru, akhirnya apa yang dibuat dicantumkan di *masterplan* itu *nggak ngarti* dia, padahal kalau tidak sesuai dengan sejalan selaras dengan RPJMN itu, ya dia tidak mendapat apa apa. Artinya bagaimana caranya agar itu berkesinambungan dan memang betul-betul jalan *gitu* Pak, *enggak* hanya sekedar rencana-rencana dan kelihatannya seperti itu rata-rata di daerah Pak, tidak paham dia. Ketua Bappeda-nya yang dipilih juga dia tidak paham. Jadi ya bagaimana caranya tentu itu menjadi salah satu program yang juga mencari jalan keluar sekalian Pak ya, sabar, sabarlah Pak, karena *nggak* sama, sama tingkat pendidikan pemahaman seluruh Indonesia ini berbeda-beda Pak, jadi jangan disamakan. Bukan berarti mereka tidak pintar, pintar tapi kalau tidak ada informasi yang sampai sama dia ya tidak ada apa-apa jadinya. Sehingga akhirnya pergi ke calo, begitu calo datang, datang KPK, selesailah sudah semua, kan *gitu* Pak.

Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan seluruh apa yang kita rencanakan ini bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Marsiaman. Sebelum saya ke Pak Misbakhun, silakan Pak Prof. Hendrawan dulu.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Komisi XI yang saya hormati.
Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan segenap jajarannya.

Salam sehat Indonesia untuk kita semua.

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh fraksi kami.

Yang Pertama, kami ingin menanyakan perkembangan pembentukan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana kita tahu akan segera berakhir. Nah undang-undang ini penting agar negara membangun visi bersama ke depan mengingat pada Tahun 2023 ini semua Parpol atau gabungan Parpol yang mempersiapkan calon presidennya sedang menyusun referensi teknokratik untuk calon presidennya yang akan diusung nanti. Itu sebabnya negara harus berada di atas pemikiran-pemikiran semua Parpol maupun gabungan Parpol ini agar konsistensi pembangunan ke depan bisa terjaga. Itu yang Pertama, saya ingin menanyakan perkembangannya karena Tahun 2023 akan menjadi tahun politik. Kalau substansi dari RUU yang disiapkan Bappenas ini bisa disampaikan kepada DPR lebih awal atau bisa diselesaikan lebih awal akan jauh lebih bagus.

Yang Kedua, saya ingin menanyakan tentang realisasi atau seberapa realistis kemiskinan ekstrim 0% pada Tahun 2024 sebagaimana hasil Rapat Kabinet Terbatas 4 Maret 2020 yang lalu. Ini Pak Menteri karena dalam pembicaraan kami kemiskinan ekstrim 0% ini akan menjadi salah satu *legacy* dari pemerintahan ini. Itu saya ingin menanyakan perkembangan dalam bahan rapat ini Halaman 26 sudah disinggung, tetapi kami belum bisa mengukur karena pernyataan-pernyataannya ini tidak terlalu eksplisit. Itu yang Kedua.

Yang Ketiga, Pak Menteri, kita semua menyadari bahwa pandemi melahirkan pola *recovery*, pola pemulihan yang berbentuk huruf K *key safe recovery*. Ini mudah dimengerti karena mereka yang masuk kelompok menengah ke atas lebih mudah beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan kehidupan pasca pandemi, apakah itu adaptasi terhadap ekonomi digital ya, kemudian pola-pola pekerjaan yang baru dan seterusnya.

Nah ini berarti *index* gini kita duga akan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021 ini dan seterusnya. Sementara di dalam berbagai program kita selalu mengusung tema *sustainability*. Itu sebabnya saya ingin mengusulkan agar Bappenas memanfaatkan momentum ini tidak hanya *sustainability* ya yang harus kita munculkan sebagai panggung utama pemulihan ekonomi, tetapi juga *equitability*. Saatnya saya kira bagi Bangsa Indonesia untuk menempatkan keadilan dan proses distribusi sebagai agenda utama kegiatan-kegiatan ke depan, karena kita pahami semua sudah paham bahwa faktor keadilan ini menjadi faktor kunci pertumbuhan bangsa ini ke depan. Itu sebabnya kami ingin mendorong Bappenas agar *equitability* ya bisa diajukan sebagai agenda penting ke depan.

Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih. Salam sehat Pak Menteri dengan segenap jajaran di tengah-tengah kondisi yang luar biasa *disrupsi* di mana-mana, kita tetap semangat bekerja dengan produktif.

Salam kebangsaan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof.

Saya langsung saja ke Pak Misbakhun. Sebelum ke Pak Hatari yang terakhir. Silakan Pak Misbakhun.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Pak.

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Ketua, nanti izin Ketua, Hidayatullah.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih.

Pak Amir yang memimpin rapat yang saya hormati beserta Pimpinan.
Seluruh Anggota Komisi XI yang saya hormati.
Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saya hormati beserta jajaran.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Saya mungkin *agak* berbeda Pak pertanyaannya. Saya bicara soal RPJMN 2020 sampai 2024 mengenai strategi kita mengenai simplifikasi tembakau Pak, tarif cukai tembakau dan saya melihat di RPJMN ini saya melihat belum ada upaya yang terintegrasi walaupun itu judulnya RPJMN dan saya tidak tahu kenapa kemudian prevalensi rokok remaja dan sebagainya menjadi sebuah acuan, padahal menurut riset kan tugasnya pemerintah kan dengan persentasi yang ada 2019 itu kan seharusnya sudah makin melandai dan isu mengenai prevalensi rokok remaja anak-anak ini kan sudah tidak menjadi sebuah acuan dan kecenderungan pemerintah kemudian di dalam RPJMN itu setuju terhadap sebuah simplifikasi tarif cukai, seakan-akan tidak melihat Pak sebuah kepentingan di RPJMN ini saya tidak ketemu sama sekali mengenai bahwa penerimaan cukai itu adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara. RPJMN kita bagaimana mungkin bersifat asimetri hanya menilai cukai itu dari sisi kesehatan semata.

Dan kemudian kalau kita bicara tentang simplifikasi tarif cukai itu kan kita hanya bicara tentang satu Pak, kepentingan industri besar. Bagaimanapun juga kita tahu tembakau ini menghasilkan sebuah potensi ekonomi yang sangat besar, tidak hanya memberikan dampak terhadap penerimaan negara, tapi juga menghidupkan perekonomian di tingkat pertanian maupun di industri-industri kecil pertembakauan yang dikelola oleh masyarakat Pak.

Saya tidak pernah menyangkal bahwa ada isu mengenai kesehatan, tetapi ini kan bukan satu-satunya permasalahan di dalam dunia kesehatan kita rokok ini, tingkat kematian dan sebagainya, dan saya sangat sedih Pak dengan RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan cukai tembakau, di mana membicarakan simplifikasi, sangat signifikan, bersifat asimetris dan tidak berpikir tidak membicarakan hal-hal yang sangat strategis, misalnya bagaimana tembakau itu menjadi produk pertanian strategis, kemudian bagaimana peran cukai itu bisa menopang penerimaan sampai sekitar dua 200 triliun dan kemudian memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap penerimaan negara kita di saat kemudian kita mengalami kontraksi pertumbuhan penerimaan yang masih bisa mencapai 100% itu hanya di sektor cukai tembakau.

Nah saya menginginkan Pak, menginginkan bahwa RPJMN ini lebih objektif, walaupun kemudian sudah disusun. Apalagi kemudian di dalam RPJMN itu ketika kita berbicara tentang *symptoms-symptoms* penyakit tidak

menular lainnya yang disebabkan oleh rokok itu dibicarakan sangat serius seakan-akan bahwa rokok ini satu-satunya penyebab permasalahan kesehatan di Indonesia.

Lah ini Pak kalau saya berharap ke depan simplifikasi ini kan hanya menguntungkan tarif ini, hanya menguntungkan kelompok industri besar. Bagaimana Pak kemudian kita tidak pernah punya *roadmap* industri-industri rumahan yang memberikan dampak ekonomi kalau kita bicara tentang Gini Ratio dan sebagainya, karena apa Pak, adalah sebuah keniscayaan di seluruh dunia makin ditekan rokok inikan industri kan selalu tidak pernah mati Pak.

Orang selalu berbicara bahwa tarif rokok di Indonesia itu sangat berat tanpa pernah membandingkan kemudian membandingkan dengan Singapura yang begitu mahal, Australia yang begitu mahal, tapi tidak pernah membandingkan *income* perkapita Rakyat Indonesia itu, dan kemudian terjadi pertarungan yang sangat ideologis antara anti rokok dengan para pendukung sektor pertembakauan ini. *Nah* ini kan menjadi sangat diametrikal dan negara kemudian kalau saya lihat dari RPJMN, RPJMN yang ada itu bersifat tidak adil dan saya berharap Pak Menteri yang sangat bijaksana ini kan bisa kemudian membongkar kembali RPJMN ini Pak, karena sampai saat ini yang dijadikan titik tumpu setiap Menteri Keuangan diskusi dengan Komisi XI, diskusi dengan Badan Anggaran soal kenaikan tarif cukai ini adalah hasil RPJMN ini Pak.

Dapil saya ini Dapil tembakau Pak. Dapil saya ini Dapil tembakau Pak. Kabupaten Probolinggo ini tembakau penghasil tembakau, Kabupaten Pasuruan itu tempat industri tembakau Pak gitu dan prevalensi mengenai FCTC dan sebagainya itu kan semuanya itu selalu berkaitan dengan resiko kesehatan. Protokol-protokol FCTC ini kan selalu diikuti oleh Pemerintah Indonesia itu, diikuti dengan sangat serius, sangat serius.

Nah ini Pak, saya mengharapkan ada upaya-upaya yang lebih objektif komprehensif melihat situasi pertembakauan kita, karena ya itu Pak, Menteri Keuangan selalu bicara berbasis kepada RPJMN yang disusun ini.

Kemudian Pak berikutnya saya bicara soal PMN Pak (Penyertaan Modal Negara). Penyertaan Modal Negara ini sangat masif sejak 10 tahun 7 tahun terakhir ini dan saya melihat selalu bersifat sangat insidental tanpa ada perencanaan strategi seperti apa kita membangunnya. Saya ingin mengukur apakah di sini Bapak sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilibatkan ? karena ini kan apa Pak, kalau kita berbicara tentang prosedur tripartit menyusun APBN, apakah PMN ini pernah dibicarakan pada tingkat pembahasan tripartit ? Ini Pak yang menjadi pertanyaan saya, karena tiba-tiba PMN itu bisa berubah di dalam proses perjalanan APBN itu sedang berjalan, bukan di penyusunan-penyusunan awal, padahal ini kan menyangkut proyek-proyek strategis nasional.

Ada proyek strategis nasional ketika di-*chip in* di tengah jalan, ini kan menunjukkan lemahnya kita membuat perencanaan, lemahnya kita membuat

strategi jangka panjang terhadap pembangunan kita. Apakah kita akan memermalukan diri kita sendiri Pak dengan situasi dan keadaan itu ?

Kita mengatakan punya Proyek Strategis Nasional, tetapi perencanaannya kemudian itu seakan-akan kita tidak punya strategi. Bagaimana mungkin Pak sebuah contoh sederhananya Pak, kereta cepat yang masuk program perencanaan strategi nasional, proyek strategis nasional, kemudian di tengah jalan yang tadinya tidak melibatkan APBN kemudian menjadi melibatkan APBN melalui mekanisme PMN.

Kami ingin menjaga ingin mengawal pemerintahan ini Pak, sehingga kami harus membangun narasi yang baik, narasi yang elegan, yang bisa diterima oleh nalar publik dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal, tetapi kalau kemudian kalau logikanya melompat-lompat, kami sendiri kan juga tidak bisa kemudian menjelaskan dengan baik ke masyarakat. Bukan hanya di proyek itu Pak, banyak PMN-PMN yang kemudian contoh saya tidak menemukan sebuah cetak biru bagaimana menyelamatkan Garuda Indonesia, *carrier flight*, model bisnisnya akan dibuat seperti apa ya kan, apakah tetap akan dijadikan sebuah desain penerbangan nasional model penerbangan nasional dengan bisnis model yang berbeda, hanya tidak pernah berbicara lagi *profit* atau tidak, tetapi dia akan menjadikan *carrier flight* yang akan mengantarkan manusia dari seluruh penjuru dunia ke wilayah Indonesia, seperti halnya Emirates, seperti halnya Singapore Airlines, Qantas dan sebagainya, karena apa, mereka sudah tidak berbicara tentang bagaimana buku mereka, tetapi bagaimana negara mereka dikenal, kemudian mereka mempunyai kebanggaan nasional yang mengantarkan orang-orang yang ingin mencapai Indonesia walaupun ada penerbangan-penerbangan yang lain.

Pemerintah mereka membicarakan soal *subsidies* misalnya di Emirat mengenai *fuel* mereka. Singapura berbicara bagaimana Singapura Airlines *connecting The World* untuk menjadikan Singapura adalah *hap* bagi dunia internasional di kawasan dan di regional. *Nah* saya tidak menemukan itu Pak. Kita *chip in* kepada Garuda Indonesia, terus kemudian orang berbicara tentang kebangkrutan, berbicara tentang kepailitan, seakan-akan kita tidak punya strategi bagaimana membangun industri penerbangan nasional yang berbasis kepada nasional *carrier flight*.

Sama juga Pak dulu kita punya contoh bagaimana membangun *double track* kereta di Jawa. Tiba-tiba kemudian muncul proyek kereta cepat dan itu tidak pernah masuk dan tidak pernah dibicarakan sama kita. Yang ada adalah pembicaraan rebutan tender yang menang Jepang atau menang China.

Sistem transportasi kita itu akan direncanakan dengan cara apa ? Apakah simbolisme negara maju itu diantaranya kereta cepat itu ? ya, tetapi dengan cara apa kita mencapainya ? apakah langsung kita melompat dari kereta yang dari Jakarta-Surabaya itu 12 jam, kemudian kita melompat dari Jakarta-Surabaya itu menjadi cuma sekitar 3 jam ? *Nah* saya menemukan ini Pak. Kemudian semuanya dibiayai dengan PMN.

Bagaimana industri dirgantara kita ? Bagaimana industri kita membangun Tol Laut ? terus kemudian bagaimana industri pertahanan kita ? Semuanya saya menemukan itu adalah proyek yang sangat-sangat tergantung kepada siapa yang memimpin kementeriannya, siapa memimpin kelembagaannya, dan bagaimana dia bisa bernegosiasi dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan akses anggarannya, akhirnya begitu Pak. Akhirnya kan kalau seperti ini kuat-kuatan, kuat-kuatan apa, kalau Menteri kursinya banyak, Menteri akan memperhatikan, kalau kursinya sedikit itu akan disia-siakan. Apakah cara begini cara kita membangun strategi pembangunan nasional ?

Nah ini yang harus menjadi *konsen* Pak. Bapak sebagai seorang pemikir, seorang politisi yang mempunyai *record* yang sangat panjang, punya pengalaman dan saya harapkan ini bisa menjadi salah satu pemikiran kita ke depan.

Terus kemudian Pak mengenai IKN ini Pak. IKN ini akan menjadi *legacy* bagi pemerintahannya Pak Jokowi dan saya berharap Pak IKN ini tidak menimbulkan polemik politik, karena kita menyiapkan semuanya dengan sangat *proven* mulai dari undang-undang dan sebagainya dan kemudian tidak menimbulkan hasrat bagi penggantinya Pak Jokowi untuk kemudian membatalkan undang-undang ini. Karena apa, kewenangan politik mempunyai kemampuan untuk melakukan itu Pak, karena apa, hanya dengan cara apa yaitu dengan cara menjelaskan bahwa kebutuhan tentang IKN ini memang adalah kebutuhan negara bukan kebutuhan satu rezim, bukan kebutuhan suatu perodesasi seorang Presiden, bukan, tapi ini adalah kebutuhan negara, *lah* ini yang harus dijelaskan.

Nah narasi ini harus dibangun karena pihak-pihak yang tidak menyetujui terhadap perubahan adanya IKN ini selalu bicara soal *oh* nanti presiden berikutnya bisa membatalkan, karena apa, belum dibangun narasi bahwa ini adalah kebutuhan negara yang bersifat jangka panjang, permanen dalam sebuah periode yang panjang, panjang Pak ya, permanen dalam periode yang panjang saya berharap 200 tahun, 300 tahun dan sebagainya dan ini harus dijelaskan kepada masyarakat, baik dalam segi apapun, mulai dari pertahanan, mulai dari sesi geospasial, mulai dari kebencanaan, mulai dari bagaimana membangun Indonesia sentris dan sebagainya. Nah ini yang harus dijelaskan dan saya melihat apa lagi kemudian yang terjadi itu adalah situasi-situasi kita terjebak misalnya satu menteri ngomong anggarannya dari PEN, kemudian yang satunya lagi ngomong berbeda, satunya lagi ngomong bahwa di sana tidak ada kawasan konsesi yang serius misalnya pertambangan dan sebagainya, kemudian ada yang mengatakan di sana ada konsesi tambang dan sebagainya. *Lah* hal-hal yang seperti ini kan harus diselesaikan, oleh siapa Pak, ya oleh pemerintah yang mempunyai ide dan gagasan besar mengenai membangun IKN itu.

Dan yang terakhir Pak Menteri yang saya hormati. Saya juga belum melihat strategi dan perencanaan nasional kita keluar dari situasi Covid-19. Bagaimana UMKM ini mau diangkat baik itukah menghadapi *short term shock medium impact*-nya seperti apa, terus *exit strategy* kita seperti apa. Saya

belum menemukan Pak dan itu dibungkus sebagai sebuah perencanaan dan strategi pembangunan nasional yang secara holistik dan komprehensif membahas semua komponen-komponen bangsa mulai dari sisi pendidikan yang orang tadinya *online* kemudian dari *offline* kembali. Kemudian bagaimana pemerintahan yang tadinya *work from home* kemudian setengah kemudian kembali kepada, saya belum menemukan dan bagaimana strategi kita masuk dari masa pandemi kemudian masuk ke endemi. Bagaimana kemudian kita mereformasi sistem kesehatan nasional kita menghadapi situasi-situasi ini, karena apa ini *not the end of the pandemics*. Kita akan ketemu pandemi yang akan datang sehingga bangsa ini mempunyai bahan referensi-referensi strategi pembangunan nasional yang komprehensif, holistik bagaimana kalau kita menghadapi pandemi diagnosa yang akan datang.

Sama seperti kita ketika menghadapi Pandemi Covid-19, terus kemudian kita tidak mempunyai bahan referensi, *academic literature*-nya terbatas. Ketika orang hanya berbicara soal flu Spanyol di awal abad 19 *no onces no leaders* yang mempunyai pengalaman bagaimana *handling* permasalahan ini.

Kemudian orang berbicara tentang kapasitas *leadership* untuk mengatasi keadaan-keadaan syok yang ireguler dan bersifat sangat dramatis. *Lah* perlu strategi pembangunan nasional kita dibangun untuk itu Pak, sehingga apa, suatu saat ketika pandemi *the anothers pandemi in the future time* itu ada dan terjadi, kita mempunyai basis literatur. Apapun yang pernah kita jalani, apapun yang pernah kita alami oleh bangsa ini, sesakit apapun, sesulit apapun, itu menjadi basis kita menghadapi *the another pandemi in the future*. Itu Pak Menteri mohon maaf apabila saya kebanyakan ngomong. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Misbakhun. Pak Hidayatullah silakan.

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang.

Salam Sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi XI beserta Anggota Komisi XI.
Pak Menteri beserta seluruh jajaran.

Hari ini kita bicara dengan kementerian yang terkait dengan Perencanaan, artinya harapan kita itu terhadap kementerian dan badan ini pada akhirnya antara perencanaan dengan realisasinya itu dekat, karena kalau kementerian lain kan *nggak* ada judul perencanaannya walaupun melakukan perencanaan, tapi ini khusus Menteri yang berbicara tentang perencanaan.

Kalau di kementerian yang terkait dengan perencanaan lalu targetnya tidak tercapai, orang akan mempertanyakan bagaimana kualitas perencanaannya. Misalnya kita bicara tentang Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi. Rencana kita 5% tumbuh tapi realisasinya 3,5. Waktu itu kita *agak* berdebat juga waktu itu karena optimisme dari Pak Menteri waktu itu, bahkan angkanya waktu itu ada yang di atas 5% pertumbuhannya, tapi akhirnya disepakati 5% itu pun tidak tercapai. Nanti mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan apa faktor-faktor tidak tercapai dan angka 3,5 itu pun terbantu dengan naiknya harga komoditas ekspor kita batu bara dan sawit, seandainya itu tidak ada mungkin angkanya bisa lebih rendah gitu dari angka yang kita targetkan, padahal Pak Jokowi waktu pidato pelantikan dia sudah mencanangkan bahwa di 2045 *income* perkapita kita itu 27 juta per bulan atau 320 juta per tahun, yang itu hanya bisa dicapai apabila pertumbuhan ekonomi kita menuju 2045 itu rata-rata 7% per tahun. Sementara pertumbuhan kita ini untuk melewati 5% saja pun masih sulit *gitu*. Nah itu kerja keras kita bersama bagaimana agar cita-cita itu bisa tercapai dan memberi kesejahteraan buat masyarakat kita.

Belum lagi misalnya di satu sisi pertumbuhan itu gagal tercapai, tapi kalau melihat indikator tingkat kemiskinan justru kita berhasil bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Nah ini pertanyaan lagi, di satu sisi pertumbuhan ekonominya tidak tercapai, tapi indikator tingkat kemiskinan justru turun sehingga ini menjadi pertanyaan, catatan kami misalnya catatan kritisnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini perkara survei yang dilakukan BPS misalnya, angkanya bisa bagus karena waktu survei pada saat panen raya misalnya. Pada waktu survei pada saat baru menerima BLT. Jadi hasilnya semu bisa semu gitu. Nah ini jadi catatan kita ke depan agar bisa apa yang indikator yang ada kita turun ke masyarakat itu yang menerima pengaduan langsung nyambung dengan data-data yang kita terima di ruangan ini gitu. Tidak ketika ketemu dengan masyarakat terjadi kesenjangan yang jauh antara data dengan kondisinya.

Belum lagi kalau kita cerita kemiskinan, tadi Bu Anis sudah menyinggung misalnya kriteria miskin kita itu berapa 400.000,- 500.000,- sehingga sebenarnya 400.000,- per kapita itu mungkin seminggu saja sudah habis gitu, tapi di atas kertas kita cerita tentang data seperti itu. Jadi nanti mohon penjelasan dari Pak Menteri kira-kira di mana melesetnya capaian pertumbuhan kita dari 5% hanya tercapai 70% saja ya 3,5%.

Kemudian UMKM, menarik ini Pak harus ada *leading sector*-nya tadi Pak Kamru ya, karena seolah-olah ini hanya jualan jualan politik saja. Semua berbicara tentang UMKM tapi sesungguhnya UMKM itu tidak tersentuh gitu, tidak tersentuh secara apa ya secara sistematis, karena setahu saya kalau di

UMKM itu mereka itu tidak punya pilihan lain selain berusaha, yang mikro kecil tidak mau disentuh pemerintah, tidak disentuh oleh pemerintah, kementerian segala, mereka akan tetap kerja.

Nah jadi idealnya kehadiran jargon-jargon membina UMKM sejak puluhan tahun yang lalu gitu memberi dampak kepada UMKM-nya gitu. Ada jelas data-datanya, tidak seperti yang saya katakan mereka dibantu atau tidak dibantu, mereka tidak punya pilihan lain kecuali berusaha di sektor mikro kecil, terutama yang mikronya gitu.

Jadi harapan saya kira-kira harus ada *leading sector* yang kita bisa meletakkan tanggung jawabnya gitu. Tidak seperti sekarang ketika tanggung jawab *nggak* ada yang tanggung jawab karena masing-masing tadi macam mana mau tanggung jawab dari BI karena memang bukan Tupoksi-nya UMKM misalnya. OJK tapi semua bicara UMKM. Ini dimulai dari sisi perencanaan, Pak Menteri di sinilah harus kelihatan semua bagaimana kita mendesain UMKM kita itu menjadi UMKM yang kuat tumbuh dan berkembang.

Yang terakhir, yang Ketiga terkait IKN dari sisi keuangan, karena kita di komisi ini kan bicara terus keuangan. Tadi Pak Misbakhun cerita PMN yang insidental gitu. Jadi rebutan nih masalah, sementara keuangan kita celah fiskalnya sangat-sangat terbatas.

Ya kemarin kita bisa *survive* misalnya di sini kita ada program *burden sharing* dengan BI misalnya cetak uang ratusan triliun dan ini 2023 kita *nggak* bisa lagi. Nah jadi harus ada rencana yang yang tepat agar ketika kita masuk masa transisi di 2023 dan seterusnya, dukungan keuangan kita yang sangat terbatas itu bisa dialokasikan dengan, dengan tepat gitu, terutama terkait IKN tadi kita sudah menjadi undang-undang tentu harapannya ini jadi *gitu*, tapi melihat dukungan keuangan yang ada, kita ini nanti minta pandangan dari Pak Menteri kira-kira memungkinkan *nggak* untuk perencanaan kita ke depan yang tadi dikatakan lain menteri lain pandangannya. Ada yang dari PEN ternyata diralat dengan menteri yang lain.

Terakhir, walaupun kita punya 300 triliun aset di DKI ini milik pemerintah kan tidak mudah menjualnya, kecuali jual, jual murah ya, sehingga harapan bahwa tadi itu IKN itu menjadi satu *legacy* gitu, justru nanti meninggalkan sesuatu yang kebalikannya. Saya kira demikian Pimpinan. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa 'alaikum salam Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hidayatullah, terakhir dari Meja Pimpinan, silakan Pak Hatari.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran yang kami hormati.
Teman-teman Anggota Komisi XI.

Pak Menteri hebat, Pak Menteri hebat ini Pak Menteri-nya. Saya berani mempertanggungjawabkan testimoni ini karena saya baca di sini baca di sini dan saya membandingkan. Tadi saya berbisik-bisik dengan Pimpinan Rapat karena saya lupa namanya Menteri PPN/Kepala Bappenas yang pertama yang kami duduk di sini 7 tahun yang lalu, kemudian diganti dengan Pak Bambang Brodjo, tidak seperti ini.

Pak Menteri dan jajarannya, saya lihat pada halaman yang paling terakhir itu penataan dan penguatan pendampingan pembangunan. Salah satunya adalah uji coba penerapan standarisasi pendampingan pembangunan “a” ini kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh Bappenas pada tingkat daerah provinsi, tetapi juga kementerian lembaga ikut di dalam program ini.

Ini Pak Menteri yang selama ini kita tidak pernah mendengar monitoring, tidak pernah *monitoring* ini jadi dilepaskan begitu saja, *impact*-nya apa karena sasaran atau tidak yang penting realisir. Soal kena sasaran atau tidak itu soal nanti yang penting DPA-nya direalisir, itu Pak. Sehingga saya baca ini sudah saya bilang ini yang terlalu luar biasa bagi saya sehingga saya mengatakan Pak Menteri hebat. Saya berani mempertanggungjawabkan testimoni ini.

Yang berikut juga terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan di daerah ini. Tahun pertama Pak Menteri datang di sini dan ini juga sudah dicita-citakan. Ini berkualitasnya perencanaan daerah dan pemanfaatan dana dekonsentrasi dan kerja sama kajian ini. ini *gak-gak* pernah lah ini Pak dan kalau mau dibuka ini halaman *paper* ini, halaman per halaman memang terjadi perbaikan, terjadi perbaikan yang baik, contoh indikator ini ada tujuh indikator perbaikan kinerja dan indikator pembangunan tingkat kemiskinan tadi juga disinggung dari teman PKS, Gini ratio, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan termasuk juga tadi kemiskinan yang membaik, indikator kemiskinan yang membaik. Ini hal-hal yang semakin kita membuka ini halaman per halaman, kita menemukan itu sesuatu yang baru, yang sebelumnya kita tidak pernah melihat itu.

Satu lagi tadi adikku Ibu Anis kok tadi hanya cuma menyebut Papua Barat ? Saya pasang kuping kok Ibu hanya menyebut Papua Barat terkait dengan pertumbuhan ekonomi per provinsi 2020/2021. Memang menyolok, dari semua provinsi ini yang paling tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara. Jadi saya bukan bicara membangga-banggakan diri, tapi tertulis di sini nyata bahwa Maluku Utara tertinggi atau 13,1% dan setiap QI sampai QIV tidak ada minus. Halaman 14 Pak Menteri, Halaman 14 Pak Menteri. Ini hanya Provinsi Bali, Papua Barat, juga termasuk masih terjadi konsentrasi.

Satu lagi ini Pak Menteri, Provinsi Bali ini kan destinasi daripada untuk pariwisata-pariwisata, kok di sini malah tidak ada satu Q pun yang *plus*, setiap tahun minus terus. Dalam satu tahun ini minus terus, padahal ini pusat. *Lah* kalau kita mau bicara *home base*-nya ya Bali ini ya sudah pariwisatanya tapi kondisinya masih terjadi seperti begitu.

Jadi sekali lagi Pak Menteri saya semakin kita buka halaman per halaman ini dan memang *mengasyikan* juga tapi memusingkan juga. *Mengasyikan* tapi memusingkan juga gitu, tapi tadi program dan kegiatan tentang penataan dan penguatan pendampingan pembangunan ini yang luar biasa.

Uji coba penerapan standarisasi, uji coba standarisasi pendampingan pembangunan kementerian lembaga Pemda dan juga non pemerintah. Terkait soal standarisasi, kita bicara standarisasi Pak, kementerian lembaga saya tidak tahu, tapi di daerah provinsi kabupaten yang namanya standarisasi harga itu *enggak*, tidak pernah buat sama sekali, walaupun dianjurkan. Jenis barang yang sama dalam toko yang berjarak 5 meter harganya beda gitu. Kalau sekarang didung-dung minyak goreng satu harga, apa ini bertahan lama ? Nah jadi ya kita ikut saja.

Yang terakhir nih Pak Misbakhun, mana tadi Pak Prof ya, dilaporkan kami tiga ini Pak Amir, Ibu Anis, ditambah kemarin kyai ya Kyai Nasori ya kami Kunker ke Balikpapan dan sampai kepada titik nol. Sambil jalan saya di dalam hati *waduh* melebihi Fakfak kabupaten di Papua ini Masya Allah dan ya mudah-mudahan Pak Menteri jaga kesehatan, sehat wal afiat, panjang umur, kita ini yang semua ya ini kita tidak bisa ulas terlalu jauh, tapi ini publik melihat *oh* luar biasa, *wah* luar biasa. Begitu tayangan di televisi yang keluar di mulut publik hanya luar biasa, luar biasa, tidak ada yang tidak luar biasa, tapi setelah datang di sana kita melihat kita juga tidak bisa lagi bicara dua hal itu, luar biasa dan tidak luar biasa kita *enggak* bisa bicara lagi. Lihat saja nanti ya.

Jadi itu yang saya lipat, lipat, lipat sini tapi saya takut ini karena ini *paper*-nya bagus Pak. Jadi Pak Amir Pimpinan Rapat, terima kasih memberikan kesempatan untuk saya juga memberikan pandangan-pandangan tentang kinerja dari pada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas. Terima kasih Pak Menteri dan semuanya.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa 'alaikum salam Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Hatari dari Meja Pimpinan.

Bapak Ibu sekalian, Teman Pimpinan dan Anggota Komisi XI sudah memberikan masukan, tanggapan dan pendalaman terkait dengan materi Rapat Kerja kita hari ini dan saya tahu kondisi Pak Menteri hari ini tidak maksimal dalam kondisi kesehatan yang tidak maksimal. Tentu saya berikan kesempatan untuk dijawab Pak Menteri, mungkin dijawab secara global saja. Nanti secara tuntas bisa dijawab secara tertulis. Silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Baik, terima kasih.

Pertama, saya ingin sampaikan tugas utama dari Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami memang menyusun perencanaan sedemikian rupa secara teknokratik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dan tentu kita merekognisi capaian-capaian sebelumnya dan juga mengikuti perkembangan kemajuan dan menghitung segala peluang yang dimungkinkan ke depan.

Ketika perencanaan itu kami susun, memang bukan pada kami lagi untuk melakukan eksekusi itu. Saya pernah menyampaikan misalnya terkait dengan bagaimana cara pandang kita terhadap pertumbuhan ekonomi. Bappenas terhadap pertumbuhan ekonomi itu sifatnya *targeting* yang harus dicapai, bukan asumsi. Kalau kita mau tumbuh seperti ini, maka apa yang harus dilakukan, serumpun kegiatan, serumpun kebijakan yang harus menyertainya yang harus dilakukan.

Memang Tahun 2021 kita tidak tercapai, kita sama-sama tahu kita mendapatkan serangan pandemi ya pada Triwulan ke II dan ke III dan kemudian agak sedikit melandai, sehingga kalau kita lihat dari pergerakan *Google mobility* maka terjadi penurunan yang luar biasa, karena *consumption* menjadi dominasi selama ini di dalam pertumbuhan ekonomi dengan pergerakan yang turun itu dengan sendirinya dia terkoreksi. Jadi saya ingin menyampaikan dulu posisi itu dengan *pas*.

Yang Kedua, saya ingin sampaikan ini ada beberapa isu yang menurut saya memang penting menjadi diskusi yang *pas* antara Komisi XI dan Bappenas. Yang Pertama terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 hingga 2045. Kami sedang menyiapkan Naskah Akademik untuk itu, kami sedang menghimpun segala sesuatu untuk kepentingan itu, tetap secara politik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam bentuk undang-undang atukah itu seperti yang kita dengar yang dikembangkan apa yang disebut dengan Pokok-pokok Haluan Negara.

Nah posisi itu menjadi penting kalau kita ingin bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang itu mengikat dan negara mengatasi seluruh kelompok dan golongan dan partai politik memang itu perlu dipikirkan, sebab Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional posisinya adalah undang-undang, tetapi secara material kami menyiapkan itu dan sedang berproses mengenai RPJPN 2025-2045 dan apabila yang diambil nanti tidak dalam posisi bentuk undang-undang, boleh jadi sistem perencanaan pembangunan nasional yang bentuknya undang-undang juga perlu direvisi, sehingga paralel dengan itu Bappenas menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang kami belum pastikan duduk politiknya dan kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional. Itu yang saya kira perlu kami sampaikan.

Yang Kedua, kemiskinan ekstrim. Saya akan minta nanti Pak Pungky kalau diizinkan untuk menyampaikan biar lebih data-data bisa disiapkan oleh Pak Pungky mengenai kemiskinan ekstrim ini. Memang mengenai standar cara perhitungannya itu memang jadi PR kami karena banyak KL yang akan terlibat di sana yang sedang memang menjadi perhatian kami.

Berikutnya mengenai UMKM. UMKM Bappenas telah mengusulkan kepada Presiden untuk melakukan *pooling* program dan anggaran dari semua KL-KL yang mengalokasikan UMKM, sehingga UMKM itu di-*pooling* di Kementerian UMKM, karena memang anggaran itu tersebar hampir di semua kementerian dan lembaga.

Namun kita juga baru punya pengalaman baru dengan BRIN yang juga dibantu oleh Bappenas, di mana semua kegiatan-kegiatan Litbang termasuk anggarannya itu di-*pooling* ke BRIN, sekalipun ada beberapa KL yang bertahan karena terkait dengan pekerjaan utamanya basisnya, misalnya di Kementerian Pertanian. Memang *pattern* ini seperti itu atau tidak di tengah dunia yang organisasinya bergerak menjadi *agile*, di tengah dunia yang bergerak organisasi itu tidak *rigid* seperti yang kita saksikan hari ini.

Dan yang Ketiga nanti juga Pak Pungky tolong sampaikan mengenai terkait dengan UMKM. Dan soal tembakau, Pak Misbakhun, memang soal *sin tax* itu, cukai itukan *sin tax* namanya juga *sin*, *sin tax* ya, maka memang bagaimana caranya *sin*-nya itu dikurangi supaya dia kemudian menjadi *tax*.

Kami berusaha sedemikian rupa mengenai *abolition program* itu dengan kementerian-kementerian terkait, tetapi Pak Misbakhun banyak yang memang tidak disiplin melanjutkan itu, pergantian tembakau ke kopi atau ke coklat, tidak melihat mengenai kapasitas dari masyarakat setempat, pasar, dan lain-lain. Kami memahami persis karena soal ini juga mengancam industri rokok itu sendiri, karena masuknya rokok-rokok ilegal. Nah seharusnya mestinya ada Pak Subandi bisa menjawab itu, sama sekali kita kami tidak punya pretensi atau *negative suggestion* dalam hal ini waktu dimasukkan di RPJMN.

Yang terakhir mengenai IKN. Saya mau klarifikasi tentang titik nol. Titik Nol itu adalah sebagai titik *reference* untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan air laut. Jadi itu akan menjadi referensi berapa ketinggiannya dari titik Nol itu. Jadi titik nol itu bukan berarti di situlah kita mulai dan tidak. Istana memang bukan di titik nol, dia agak ke atas dan Gedung DPR MPR-nya itu juga keren sekali di sayap sebelah kanan, kemudian ada tempat untuk bagian Yudikatif di sebelah kirinya. Jadi saya kira bagus sekali kalau itu memang bisa terwujud.

Kita membangun IKN itu tidak seperti yang berulang kali saya sampaikan seperti menggosok lampu aladin, tapi kita melakukannya secara bertahap. Hari ini yang sudah kita lakukan memastikan tersedianya air karena itu paling penting. Dengan dibangunnya dan Sepaku Semoi dan kemudian jalan logistik.

Memang sekarang Pak Satori itu berkelok-kelok Pak Satori. Kalau Jalan Tol Balikpapan sampai dengan IKN selesai, maka dari bandara ke IKN itu mungkin sama jauhnya dari Cengkareng ke Semanggi. Jadi dalam pengertian waktu kalau jaraknya memang agak panjang sedikit sekitar 37 sampai 40 kilo, kalau dari waktu mungkin jauh lebih cepat.

Dan kemudian juga dari Samarinda ke IKN juga akan lebih cepat, mungkin sekitar 1 jam lebih sedikit. Kalau sekarang kita sudah punya koridor Balikpapan-Samarinda, maka segitiga *triangle* itu mudah-mudahan dengan tiga poros jalan tadi itu bisa menjadi pendorong untuk percepatan pembangunan di sana.

Saya mohon maaf nggak bisa banyak bicara karena gassy perut saya. Terima kasih saya minta Pak Pungky, silakan Pak Pungki.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN PPN RI/BAPPENAS (Drs. PUNGKY SUMADI, MCP, Ph.D.):

Terima kasih Bapak Menteri.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu dan Bapak Anggota Dewan yang kami hormati.
Bapak Pimpinan Komisi XI dan Ibu dan Bapak yang terhormat.

Mengenai kemiskinan ekstrim, memang sebetulnya sebelum pandemi Pak Jokowi itu menargetkan angka kemiskinan ekstrim kita sekitar 0% pada 2024. Kita sudah melihat bahwa dengan perkembangan program yang kemarin ada sebelum pandemi berlangsung, perkiraan kita kemungkinan bisa

akan kita capai di 2024, tetapi pada saat pandemi terjadi semua menjadi berubah.

Nah lalu kami melihat bahwa pendekatannya kelihatannya sudah tidak mungkin lagi kita lakukan secara sektoral Bapak. Jadi misalnya Kemsos melakukan sendiri, UMKM sendiri, PUPR sendiri, Perhubungan sendiri gitu. Lalu mulailah ide pemikiran bagaimana pendekatannya secara kewilayahan, karena dengan kewilayahan itu kita melihat tidak hanya masalah per sektor, tetapi apa yang terjadi di daerah itu yang membuat mereka tetap miskin dan susah keluar dari kemiskinan. Lalu kita mulailah melihat atas arahan dari Bapak Menteri melihat data-data dari monografi desa. Inilah yang kita usulkan menjadi digitalisasi monografi desa yang angka-angkanya data-datanya kita perbarui. Kemudian kita juga akan melakukan membaca data itu dulu sebelum intervensi kita lakukan.

Nah yang tadi Bapak Hendrawan sampaikan 95 desa percontohan, yang kita lakukan sejak 2019 itu menunjukkan bahwa apabila kita membaca data monografi desa, kita melihat data-data DTKS, lalu kita perbaiki dengan registrasi sosial ekonomi yang lebih baik, ternyata kita bisa membaca permasalahan itu menjadi lebih komprehensif. Jadi misalnya tidak hanya orang ini kekurangan bahan pangan misalnya atau akses kesehatan, tetapi juga ternyata lingkungan rumahnya juga tidak baik. Jalan tidak terbuka dengan cukup buat mereka, sehingga pendekatannya itu menjadi lebih intersektor Pak dan Ibu dan ini yang kita lakukan di 95 desa itu, sehingga inilah yang menjadi ide untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrim kita dalam reformasi perlindungan sosial.

Nah dengan demikian pendekatannya itu menjadi dalam tanda petik adalah menurut istilah Pak Menteri adalah berdasarkan kewilayahan tetapi kita lakukan bersama siapa yang memimpin, apakah Menteri-menteri mimpin-mimpin sendiri, tidak, yang mimpin harusnya adalah Kepala Daerah. Mungkin di sini TKPKD Pak yang biasanya dipimpin oleh Ketua Bappeda dari kabupaten setempat.

Nah dengan begitu persyaratannya adalah untuk mencapai Nol itu pertama perbaikan data kita lakukan. DTKS sudah diperbaiki oleh Ibu Mensos, tetapi kita harus bisa melihat hasilnya seberapa akurat DTKS itu, apabila Susesnas 2022 ini sudah tersedia datanya di Bulan September yang akan datang tahun ini Pak, jadi masih lama gitu, karena kan Susesnas baru masuk nanti Bulan Maret ya Bapak ya dan Ibu, lalu hasilnya nanti data mentahnya tersedia Bulan September kita baru bisa lihat. *Nah* sementara itu, perbaikan data di desa-desa ini kita perbaiki.

Kemudian kolaborasi semua unsur pemerintah itu harus ada, ya yang menjadi komandannya harusnya adalah Ketua TKPKD karena TKPKD itu terdiri dari unsur-unsur unit-unit kerja yang ada di pemerintah daerah. *Nah* di sini juga akan kita dorong usaha-usaha pemberdayaan masyarakatnya seperti apa. Kemudian sistem *targeting*-nya juga akan lebih baik, *Insyallah* melalui program registrasi sosial ekonomi ini dan nanti yang jelas adalah kita akan memberikan dua jenis intervensi, Nomor satu adalah apabila dia

memiliki pengeluaran yang tinggi itu kita berikan bantuan-bantuan sosial seperti yang sudah ada sekarang, tetapi dengan cara dan data yang lebih baik.

Kedua, untuk meningkatkan pendapatan kita bisa perkenalkan misalnya dengan reformasi UMKM dan juga dengan reformasi dari pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan yang Ketiga adalah dengan perbaikan prasarana dasarnya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan itu bisa menyangkut kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan, dan segala macamnya. Jadi setiap daerah itu akan memiliki warna yang berbeda, tidak bisa kita samakan lagi.

Nah inilah yang dari hasil 95 desa ujicoba itu beberapa sampel yang kita lihat menunjukkan apabila ada sebuah keluarga rumah tangga miskin ekstrim itu katakanlah rata-rata pendapatannya 280.000 seperti di Aceh misalnya, garis kemiskinannya itu adalah 350.000 dengan intervensi 2 tahun ada pelatihan vokasi tersendiri itu bisa meningkat menjadi sekitar 3 kali lipat, jadi sekitar 720.000-an per orang dalam keluarga itu. Jadi ini memang dia belum barangkali belum masuk dalam kelompok sejahtera tetapi sudah keluar dari kemiskinan ekstrim. *Nah* kira-kira gambarnya seperti ini Ibu dan Bapak mengenai kemiskinan ekstrim.

Mengenai UMKM, tadi Pak Menteri betul sudah menyampaikan bahwa memang Kementerian KUKM kita usahakan menjadi *leading sector*-nya. *Nah* yang kita usahakan adalah pertama pendekatan kelembagaan dengan mengusulkan perubahan klasifikasi kementerian ini dari kelompok 3 menjadi kelompok 2, sehingga dengan kelompok 2 itu perangkat dari kementerian bisa menjadi lebih lengkap, misalnya sekarang tidak boleh ada Pusdatin, sekarang boleh mendapatkan Pusdatin. *Nah* kemudian punya kewenangan mengkoordinir KL-KL yang lain.

Kita punya 28 KL yang melaksanakan program UMKM Ibu dan Bapak, bahkan yang mengagetkan satu kementerian itu ada yang anggarannya hanya 2 miliar, 2 miliar itu mau jadi apa sebetulnya untuk mengembangkan UMKM, tapi ini yang terjadi. *Nah* ini yang kita fokuskan.

Pak Menteri memimpin sendiri rapat mengenai multilateral UMKM ya Pak ya, di mana kita baru mengidentifikasi 8 KL yang bisa kita hilangkan program UMKM-nya, karena menurut kami memang betul-betul tidak efektif dan ini angkanya kita serahkan kepada Kementerian KUKM untuk mendorong fungsinya yang baru sebagai *leading sector* di Bidang UMKM.

Nah kenapa kita lakukan baru 8, karena baru 8 inilah yang kita sempat lakukan evaluasinya, di mana salah satu contoh banyak sekali program dilaksanakan tetapi tidak koordinasi dengan Pemda setempat sehingga penerima pelatihan itu bisa mendapatkan 5-6 kali dalam setahun pelatihan-pelatihan yang boleh dibilang hampir sama.

Kemudian yang Kedua apabila ada pendampingan, pendampingan itu ternyata bukan orang yang mengerti UMKM, tidak mengerti apa kebutuhan

pasar, bagaimana membuat dia beroperasi lebih efisien misalnya begitu. *Nah* hal-hal ini yang kita temukan di lapangan. Atas nama program UMKM KL itu merasa berhak memberikan program ini kepada mereka.

Nah kemudian yang Ketiga tentunya kita punya prinsip bahwa pendampingan berikutnya itu harus bisa membuat pelaku UMKM itu selalu bisa menjual barangnya dan dibeli pasar. Oleh karena itu, hal yang berbeda adalah sebelum kita berikan intervensi anda harus tahu barang apa yang bisa anda buat dan diterima pasar seterusnya. Berarti ada literasi pasar yang kita ajarkan kepada para pendampingnya. Kemudian kita bukakan juga akses-akses pasar yang lebih besar.

Beberapa contoh yang kita lakukan sejak Tahun 2010 misalnya menunjukkan kemitraan pasar ini sangat berhasil baik, sehingga misalnya produk-produk Kopi, Lada hitam, Lada putih, Vanila, Pala dari Indonesia itu merajai dunia, cuma memang tidak pernah terdengar begitu. *Nah* hal-hal seperti ini yang kita dorong.

Kemudian juga perbaikan data UMKM. Dengan adanya bantuan Presiden untuk produktif untuk UMKM, Kementerian KUKM itu tiba-tiba mendapatkan data sekitar 26 juta pelaku UMKM Ibu dan Bapak, tetapi mereka belum punya kapasitas Pak, Pak Misbakhun ya bagaimana mengelola *big data* ini. Kenapa, karena tidak boleh ada Pusdatin sebelumnya. *Nah* jadi ada kaitannya kenapa menjadi *leading sector* kita usulkan, anggaran kita berikan, tetapi kapasitas juga kita tingkatkan supaya pendapatan mereka menjadi lebih baik.

Nah kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memperbaiki teknologi informasi kepada para UMKM ini, sehingga digitalisasi UMKM ini bisa kita harapkan bisa menjangkau pasar lebih baik masuk dalam *value chain national* atau global dan yang tidak ketinggalan adalah akses permodalan.

Tadi kalau *nggak* salah ada pertanyaan dari salah satu Anggota Dewan mohon maaf saya lupa bagaimana *compact* berperan, *compact* antara lain kompak dari MCC ya Ibu ya kalau *nggak* salah itu antara lain membantu pendataan para pelaku UMKM kita nanti, termasuk misalnya bagaimana ketaatan dari segi keuangan itu bisa lebih melekat di para pelaku UMKM itu, sehingga pendataan kita itu tidak hanya memiliki siapa nama, apa usaha mereka, tetapi juga bagaimana *credit worthiness* mereka di dunia keuangan.

Kira-kira demikian Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Ibu dan Bapak terima kasih banyak.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Masih ada yang mau ditambahkan Pak Menteri ?

MENTERI PPN RI/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Oh enggak. Saya hanya ingin menyampaikan mungkin selebihnya kami bisa menjawab secara tertulis, termasuk mengenai Jakarta ke depan seperti apa, itu tentu penting sekali Bu Anis supaya tetap seperti sekarang. Jadi saya kira itu ada nanti kami sampaikan secara tertulis. Ya saya ingin mengucapkan terima kasih saja.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran yang tadi telah menyampaikan tanggapan atas pendalaman dari teman-teman dan tentu sisanya akan dijawab secara tertulis dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri, saya minta dari Sekretariat untuk menayangkan Rancangan Kesimpulan kita pada rapat kerja hari ini.

**Rancangan Kesimpulan Rapat Kerja
Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
Mengenai Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021
dan Rencana Kerja 2022
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021/2022**

Komisi XI DPR RI telah memperoleh Penjelasan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja 2022.

Kemudian yang Kedua, Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan fungsi dan kewenangannya agar dapat mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah penyangga pusat pertumbuhan dan kawasan tertinggal melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa, dan atau penghematan devisa, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata, sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Mungkin ada tanggapan Pak Menteri poin 2 ? tidak ada masalah ?

Tiga, Menteri PPN/Kepala Bappenas akan mengoptimalkan fungsi pengendalian dan memastikan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan peningkatan pendapatan masyarakat pada kelompok dengan status kemiskinan kronis.

Ekstrim ya ? ekstrim bahasanya ekstrim ya ? coba ya.

Kemudian yang ke Empat, Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memastikan konsistensi perencanaan dan ini penganggaran juga di Bappenas. Konsistensi perencanaan dan penganggaran program pemerintah pusat di setiap KL Tahun 2022 sejalan dengan reformasi struktural dan berdampak pada kinerja pencapaian sasaran tingkat sasaran ini, kayak orang

Makassar. Sasaran tingkat kemiskinan dan sasaran Indeks Pembangunan Manusia. Tidak ada masalah Pak Menteri ?

Terakhir, Menteri PPN/Kepala Bappenas memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lambat 7 hari kerja.

Bagaimana Teman-teman setuju ya ?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan selesainya Kesimpulan pada Rapat Kerja hari ini tentu selesai sudah Rapat Kerja kita dan atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam proses Rapat Kerja hari ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'allamin*, Rapat Kerja ini saya tutup. Sekian.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.39 WIB)

Jakarta, 3 Februari 2022

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.
NIP. 197106131998032003**